

2010

Laporan Temuan Penelitian Pemberdayaan Perempuan dalam Konteks Muslim Tahun 2008-2009

Penulis: Dian Kartika Sari, Felmi
Yetty, Juni Warlif dan Lolly
Suhenty



Balai Perempuan sebagai Organisasi Akar Rumput dalam Menghadapi Tantangan Pemberdayaan di Padang Pariaman

{Penelitian ini juga merekam proses pemberdayaan di Balai Perempuan sebagai organisasi akar rumput yang menjadi wadah bersama perempuan dalam menyusun dan menggunakan strategi-strategi untuk pemberdayaan individu dan pemberdayaan kelompok dalam menghadapi kenyataan}

Penelitian ini didukung oleh:



Daftar Isi

PENGANTAR
ABSTRAK
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Penelitian WEMC
2. Tujuan Penelitian
3. Metodologi Penelitian
4. Ruang Lingkup Penelitian
5. Penentuan Wilayah Penelitian
6. Penentuan Responden
BAB II SEKILAS TENTANG KOALISI PEREMPUAN INDONESIA
1. Sejarah dan Bentuk Organisasi Koalisi Perempuan Indonesia
2. Dinamika Strategi Pengorganisasian dalam Koalisi Perempuan Indonesia
a. Top Down Strategy (1999-2002)
b. Bottom Up Strategy (2002- 2009)
3. Dampak Perubahan Strategy terhadap Pertumbuhan Organisasi
4. Dampak Perubahan Strategi Terhadap Anggota Organisasi
BAB III IDE LAHIR DAN TUMBUHNYA BALAI PEREMPUAN
1. Lahirnya Balai Perempuan
2. Balai Perempuan mengembalikan Hak untuk berkumpul dan Berserikat
3. Perempuan Bicara Tentang Kehidupan dalam Balai
4. Bila Perempuan Bicara tentang Dirinya dalam Balai
5. Menjadikan Balai sebagai kekuatan pemersatu gerakan
6. Balai dalam Kontek Ruang dan Waktu
BAB IV. BALAI PEREMPUAN DALAM RANAH MINANG
1. Minang sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Otonomi Daerah
2. Tata Kehidupan di ranah Minang
3. Peran dan Posisi Perempuan di Ranah Minang
4. Peran dan Posisi Koalisi Perempuan Wilayah Sumatra Barat Terhadap Sumatera Barat
BAB V. BALAI PEREMPUAN DI PARIAMAN
1. Sejarah Lahirnya Kota Pariaman
2. Peran Koalisi Perempuan dalam Pembentukan Kota Pariaman
3. Balai Perempuan Di Desa Taluk
3.1. Profil Desa Taluk
3.2. Pembentukan Balai Perempuan di Desa Taluk
3.3. Aktifitas Balai dalam situasi dan waktu
3.4. Dampak Balai Perempuan Bagi Anggota
3.5. Dampak Balai Perempuan bagi Desa Taluk

4. Balai Perempuan Di Desa Bato

4.1. Profil Desa Bato

4.2. Pembentukan Balai Perempuan di Desa Bato

4.3. Aktifitas Balai dalam situasi dan waktu

4.4. Dampak Balai Perempuan Bagi Anggota

4.5. Dampak Balai Perempuan bagi Desa Bato

5. Balai Perempuan Di Korong Bungin

5.1. Profil Korong Bungin

5.2. Pembentukan Balai Perempuan di Korong Bungin

5.3. Aktifitas Balai dalam situasi dan waktu

5.4. Dampak Balai Perempuan Bagi Anggota

5.5. Dampak Balai Perempuan bagi Korong Bungin

BAB VI. ANALISIS DAN PEMBELAJARAN

BAB VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian tentang Balai Perempuan di tiga wilayah yang ada di Padang Pariaman, Sumatera Barat, dalam menghadapi tantangan pemberdayaan ini hendak membuktikan apakah Balai Perempuan sebagai salah satu struktur Koalisi Perempuan Indonesia di tingkat paling bawah yang berbasis anggota, dengan sendirinya mampu menjadi wadah pemberdayaan bagi perempuan-perempuan yang dampak positif bagi anggotanya juga bagi perempuan lain, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Penelitian ini juga merekam proses pemberdayaan di Balai Perempuan sebagai organisasi akar rumput yang menjadi wadah bersama perempuan dalam menyusun dan menggunakan strategi-strategi untuk pemberdayaan individu dan pemberdayaan kelompok dalam menghadapi kenyataan, sehingga menghasilkan pengetahuan baru. Penelitian ini juga melihat perbedaan penafsiran dan implementasi tentang Balai Perempuan di desa Bato, Desa Taluak dan Korong Bungin yang meliputi cara pandang, penerimaan, pembahasan isu yang diprioritaskan, pengambilan keputusan dan kegiatan yang dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sebagian besar perempuan yang secara aktif terlibat di Balai Perempuan merasakan dampak positif dari keterlibatan mereka secara individu maupun kolektif. Hasil penelusuran dan wawancara ditemukan bahwa salah satu faktor yang menarik mereka untuk terlibat aktif di Balai Perempuan, adalah adanya ajakan dan perubahan positif yang tampak dari para anggota yang telah lebih dulu aktif.

Meski demikian, proses pemberdayaan yang berpusat pada perempuan masih dihadapkan pada hambatan dan beberapa kendala dari sesama perempuan yang secara sadar atau tidak, menginternalisasikan ideologi patriarki.

Temuan penelitian sepanjang 2009 dapat menjadi bahan refleksi Koalisi Perempuan Indonesia dalam melihat relasi antar struktur dari Balai Perempuan sampai tingkat nasional. Sehingga ciat-cita adanya organisasi massa perempuan yang kuat sebagaimana diamanatkan dalam garis nilai dasar dan gerakan organisasi dapat diwujudkan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Pariaman, Sumatra Barat merupakan pemangku adat Minangkabau. Aturan-aturan adat Minangkabau merupakan aturan tak tertulis, dirumuskan dalam bentuk pantun dan dikenal melalui pepatah adat. Dalam Pokok-pokok Pengetahuan Adar Alam Minangkabau, Dt Rajo Penghulu (1994) disebutkan bahwa Titik tumpuan adat Minangkabau semenjak masuknya agama Islam ialah kata pepatah:



**Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah,
Adat menurun, syarak mandaki,
Adat nan kewi, syarak nan lazim
Syarak mangato, adat mamakai
Tuhan bersifat qodim, manusia bersifat khilaf.**

Hal ini menunjukkan bahwa Kitabullah (*Alqur'an*) yang merupakan kitab suci pemeluk agama Islam merupakan sendi dari adat istiadat yang berlaku di Minangkabau.

Dalam literatur Pengangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Alua Pasambahan Adat Minangkabau (Idrus Hakimy,1997) disebutkan masyarakat menyebut kaum perempuan dengan sebutan *Bundo Kandung*. Artinya, *bundo* adalah ibu dan *kandung* adalah sejati. Bundo Kandung adalah ibu sejati yang memiliki sifat-sifat keibuan dan kepemimpinan. Bundo Kandung merupakan tempat menarik tali keturunan manusia Minangkabau yang disebut matrilineal. Bundo Kandung mengemban keutamaan dan larangan. Terdapat lima (5) keutamaan dan dua belas (12) larangan yang diberlakukan bagi *Bundo Kandung*. Keutamaan itu adalah :

1. Keturunan Ditarik dari garis Ibu
2. Rumah Tempat Kediaman diutamakan bagi perempuan
3. Sumber ekonomi diutamakan untuk perempuan
4. Yang menyimpan hasil Ekonomi adalah perempuan
5. Perempuan memiliki hak suara dalam musyawarah

Sedangkan dua belas larangan bagi *bundo kandung* adalah :

1. *Menjatuhkan kebinasaan kepada barang nan santoso*, artinya memecah rumah tangga orang lain baik dengan mulut (perkataan) maupun perbuatan.
2. *Hilia malonjak mudiak mangacau*, artinya mempunyai sifat seperti laki-laki, kurang sopan dan meninggalkan sifat kewanitaannya, melakukan perbuatan-perbuatan sumbang.
3. *kiri-kanan memecah parang*, artinya merusak perdamaian dan persatuan, mengganggu rumah tangga orang lain
4. *Mangusikalam nan salasai, mangaruah aia nan jania*, suka menghasut dan memberikan pengaruh buruk
5. *Bapaham bak kambiang dek ulek*, artinya meninggalkan sifat keibuan dan kepemimpinannya.
6. *Barunding bak sarasah tajun*, artinya dalam berunding menggunakan kata-kata kasar, pembicaraannya selalui menyakiti, bersifat sombong dan takabur dalam hati.
7. *Karano miskin pado budi*, artinya dalam diri perempuan tersebut sudah hilang rasa malu



- dan sopan, bergaul bebas dengan laki-laki yang bukan suaminya.
8. *Ambatan paham nan dikandaki*, artinya melanggar kesopanan dan tidak mau tahu dengan norma-norma adat dan agamanya.
 9. *Marubahi lahia dengan bathin*, artinya suka berdusta, menipu dan tidak jujur dalam pergaulan
 10. *Maninggakan siddiak jo tabalia*, artinya pendusta, dan kalau sudah dewasa tidak mau memberi nasihat yang baik kepada sesamanya, meskipun tahu suatu kejadian telah melampaui adat dan agama.
 11. *Mamakai Cabua sio-sio*, artinya perempuan yang suka berbuat cabul baik dalam perkataan maupun perbuatannya, di hadapan orang lain maupun familinya, dan tidak berhati-bati dan cermat dalam berpakaian, maupun dalam pergaulan.
 12. *Kato nan lalu lalang sajo, bak caro mambaka bulua, maninggakan mungkin dengan patuiek*, artinya berkata-kata kasar, tidak hormat dengan orang tua, durhaka kepada Ibu-Bapak. Meninggalkan kepatutan umum, segala tingkah laku tidak diukur dengan lingkungan adat istiadatnya dan senantiasa melanggar kesopanan.

Melihat larangan dan keutamaan yang diberlakukan, perempuan Sumatra Barat mengalami batasan-batasan dalam ruang dan geraknya. Aturan adat yang telah berlaku sejak masuknya Budaya Islam di Sumatra Barat ini berlaku sepanjang waktu, baik di jaman Kolonial penjajahan Belanda, Jaman Kemerdekaan, Masa Orde Lama, Masa Orde Baru maupun dimasa reformasi. Upaya pelemahan terhadap adat Minangkabau di setiap masa tersebut sangat beragam. Di masa Kolonial Belanda, pelemahan dimaksudkan untuk memuluskan agenda penguasaan teritorial dan sumber daya alam. Sedangkan dimasa Orde Lama Adat Minangkabau di anggap sebagai struktur masyarakat yang tidak demokratis dan borjuis. Sementara pada masa Orde Baru pelemahan dilakukan dengan mengikis secara perlahan struktur adat Minangkabau, melalui pemberlakuan Undang-undang No 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Melalui undang-undang dan serangkaian peraturan pelaksanaannya, dilakukan penyeragaman terhadap bentuk dan pemerintahan di daerah. Antara lain adalah menghapuskan Nagari dan menjadikan menjadi Desa, pimpinan daerah yang diakui oleh pemerintah dan bentuk peraturan daerah yang diakui oleh pemerintah (pusat).

Aturan adat yang dirasakan tidak memberikan keadilan bagi perempuan juga mengalami perlawanan dari kaum perempuan dalam adat Minangkabau. Berbagai kajian maupun penelitian mengenai inisiatif pemberdayaan perempuan Sumatera Barat, baik secara individu maupun kolektif, dalam memperjuangkan hak-haknya, bukanlah hal baru. Sejak pra-kemerdekaan, terutama masa kolonial Belanda, perempuan di Sumatera Barat telah melakukan berbagai inisiatif pemberdayaan sebagai upaya perlawanan terhadap ketimpangan relasi kuasa. Tercatat dalam sejarah seperti Siti Manggopoh, Hajjah Rangkayo Rasuna Said, dan Rohana Kudus telah melakukan inisiatif memperjuangkan hak-hak perempuan, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi dan politik. Wieringa (1995) menggambarkan adanya gerakan perempuan Minangkabau di Sumatera Barat dalam memperjuangkan hak-haknya di arena ekonomi dan pendidikan di tengah-tengah rekonstruksi sistem adat matrilineal oleh negara kolonial Belanda, penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, masa orde lama dan orde baru, agama, khususnya agama Islam; Wieringa (1999), memperlihatkan adanya gerakan perempuan di arena pendidikan, ekonomi dan politik, meskipun tidak hanya spesifik di wilayah Sumatera Barat. Sedangkan Blackburn (2005), menyoroti inisiatif perempuan Minang dalam mengakses pendidikan formal sejak zaman kolonial Belanda hingga awal masa reformasi.

Di masa pemerintahan Orde Baru, diberlakukan aturan yang melarang masyarakat berpolitik praktis, termasuk larangan untuk berkumpul dan berserikat. Setiap kegiatan yang

mengumpulkan lebih dari sepuluh orang harus mendapatkan ijin dari penguasa wilayah setempat (kepala Desa). Setiap orang yang akan mendirikan organisasi harus mendapatkan ijin dari pemerintah. Organisasi yang bersifat politis dilarang dan dihadapkan pada berbagai bentuk intimidasi dan represi jika organisasi tersebut secara diam-diam tetap berjalan. Hanya organisasi yang bersifat karitatif (memberikan sumbangan dan kedermawanan) dan organisasi bentukan pemerintahlah yang boleh hidup dan berkembang.

Organisasi perempuan, selain PKK, Darmawanita dan Organisasi perempuan bersifat keagamaan, dianggap sebagai ancaman dan dilekatkan label sebagai bagian dari Gerwani. Gerwani adalah organisasi pergerakan perempuan yang sangat kuat dan progresif pada masanya. Namun organisasi ini oleh pemerintahan Soeharto dinyatakan sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dan dinyatakan terlarang.

Sejak diberlakukannya reformasi, pasca kejatuhan presiden Soeharto, UU No 5 Tahun 1974 yang merupakan aturan dan sistem pemerintahan di daerah yang sentralistik, digantikan dengan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, mengubah sistem pemerintahan di Daerah berdasarkan prinsip Otonomi Daerah. Seiring dengan perubahan tersebut, masyarakat dan pemerintah di Sumatera Barat menggali dan memberlakukan kembali adat Minangkabau dengan slogan yang dikenal dengan **Kembali Ke Nagari**. Sehubungan dengan menguatnya kembali adat Minangkabau yang menyandarkan pada aturan agama Islam ini, maka perlu diteliti ulang peran dan posisi serta keberadaan perempuan di Sumatera Barat.

Penelitian ini bermaksud mengkaji Pemberdayaan perempuan di Desa Taluak, dan Desa Bato Padusunan Kabupaten Pariaman, serta Nagari Lareh Nan Panjang, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di wilayah domestik dan publik, di tengah-tengah menguatnya pengaruh agama, budaya dan negara. Secara khusus penelitian ini, meneliti peran Balai Perempuan (sebagai struktur utama) pembentuk organisasi di tingkat cabang dari Koalisi Perempuan Indonesia dalam melakukan dan memberikan sumbangan terhadap upaya pemberdayaan perempuan.

Penelitian ini merupakan bagian dari program penelitian Women Empowerment in Muslim Context (WEMC) untuk melihat konsep pemberdayaan dari dan oleh perempuan sendiri, resistensi perempuan terhadap berbagai tantangan di lingkungan domestik maupun publik dan melihat pola pemberdayaan perempuan.

Adapun yang dimaksud dengan pemberdayaan di sini mengacu pada Proposal WEMC (2006: 21), yang mendefinisikannya sebagai: peningkatan kapasitas individu perempuan, untuk membuat keputusan mandiri yang dapat mentransformasikan relasi-relasi kekuasaan yang timpang. Pada kajian ini, akan dilihat beragam tahapan dari kontinum pemberdayaan perempuan baik secara horizontal maupun vertikal.

Tahapan pemberdayaan horizontal adalah tahapan diri perempuan secara individual, mulai dari tindakan yang tidak terlihat, seperti diam, *tricky* hingga kritis.¹ Sementara, tahapan pemberdayaan vertikal adalah tahapan pemberdayaan perempuan dengan perempuan lainnya, mulai secara individu, yang bergerak ke kolektif, terorganisir hingga terlembaga.² Dalam hal ini adalah adanya Balai Perempuan yang menjadi ruang belajar bersama dan advokasi perempuan.

Dengan demikian, tim penelitian Koalisi Perempuan Indonesia bersama dengan tim SCN-CREST, melihat dan menggali peran dan posisi Balai Perempuan dalam konteks pemberdayaan sebagai sesuatu yang penting. Hal ini berguna untuk melakukan dokumentasi terhadap strategi yang dirancang sendiri oleh perempuan yang berada di Balai Perempuan untuk pemberdayaan mereka baik secara individu maupun kolektif dalam relasi internal maupun eksternalnya. Pendokumentasian strategi ini akan membuahkan pengetahuan baru mengenai transformasi

¹ Temuan LSPPA (2006). Istilah vertikal dan horizontal merupakan analisis penulis baru-baru ini ketika menangkap gejala sosial yang ada. Pada diri individu, gerakan pemberdayaan ini secara horizontal, karena kuantitasnya tidak bertambah ke sumbu atas.

² Lihat kerangka penelitian WEMC (2007)

yang dimulai dari bawah. Secara kumulatif, transformasi seperti ini akan meningkatkan demokratisasi yang timbul dari dalam, dan adanya tuntutan terhadap kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki sebagai warganegara.

1.2 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian bertujuan mengidentifikasi sebab-sebab mengapa perempuan masih mampu mengembangkan inisiatif, manakala dihadapkan pada desakan kekuatan yang melemahkan. Penelusuran terhadap alasan-alasan berkembangnya inisiatif perempuan akan menuntun kita pada pendalaman pemahaman mengenai keagenan perempuan dalam perubahan formasi sosial yang adil gender.

Tujuan lainnya adalah menganalisa pandangan-pandangan perempuan di Padang Pariaman terhadap tertutupnya akses perempuan dalam hal ekonomi, kesehatan dan partisipasi politik. Juga untuk mencari jejak-jejak pemberdayaan perempuan dan strategi perempuan Minang dalam melawan pelemahan tersebut, serta mendokumentasikannya.

Signifikansi penelitian ini setidaknya memberikan kontribusi terhadap studi-studi feminis mengenai pemberdayaan perempuan dalam konteks Muslim di Indonesia. Gambaran mengenai strategi dan inisiatif pemberdayaan perempuan memberikan pemahaman dan rekomendasi terhadap penerapan kebijakan yang mengarah pada: (1) penguatan perempuan di tingkat meso dan mikro; serta (2) terwujudnya tata pemerintahan yang baik, (3) merekomendasikan pentingnya memperhatikan struktur kekuasaan di tingkat meso, yang sangat memberikan dampak pada penyangkutan kebijakan yang memberdayakan perempuan menjadi lemah.³

Tim WEMC-Koalisi Perempuan Indonesia bersama SCN-CREST berkepentingan terhadap hasil penelitian ini guna memperkaya khazanah kajian isu gerakan perempuan di Indonesia—teristimewa di Minangkabau—juga untuk memperkuat data sebagai bahan advokasi kebijakan yang lebih besar lagi.

1.3 Perumusan Masalah

Masyarakat Sumatra Barat-khususnya Padang Pariaman adalah masyarakat yang bersandar kuat pada adat Minangkabau, dengan ketentuan agama Islam sebagai sendi utama dalam mengatur tata kehidupan adat tersebut. Perempuan (*Bundo Kanduang*) dalam masyarakat Minangkabau memiliki peran, posisi, keutamaan dan larangan sesuai dengan aturan adat. Sejumlah larangan yang diberlakukan bagi perempuan merupakan aturan yang melemahkan perempuan. Disisi lain, keutamaan yang diberikan kepada Bundo Kanduang merupakan keutamaan semu, karena banyaknya pelanggaran dalam prakteknya.

Balai Perempuan Koalisi Perempuan sebagai organisasi Akar Rumput merupakan wadah untuk merealisasikan Hak untuk berkumpul dan berserikat serta menyampaikan pendapat merupakan sarana strategis untuk melakukan Pemberdayaan perempuan di Padang Pariaman. Namun dalam perjalanannya organisasi ini menghadapi berbagai tantangan dan hambatan baik dari dalam maupun luar organisasi.

Meski Budo Kanduang memiliki lima keutamaan, kenyataannya hak atas akses ekonomi, hak atas akses kesehatan, hak atas tanah, hak atas kesempatan berpartisipasi dalam ruang publik dan politik, dan hak atas akses pendidikan tidak serta merta dinikmati oleh perempuan.

1.4 Metodologi Penelitian

Melalui metode kualitatif akan dilihat upaya perempuan menciptakan perubahan sosial. Perubahan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan ini adalah perubahan kesadaran perempuan ketika ia mendapatkan informasi atau pengalaman kemudian dipertanyakan terus menerus

³ Mengikuti signifikansi penelitian dalam proposal WEMC SCN-SP (2007)

kemudian mengubah informasi dan pengalaman tadi menjadi tantangan yang mendorong perempuan berpartisipasi secara kolektif untuk memecahkan persoalan.

Kerangka pemberdayaan *bottom-up* yang diusung WEMC dan Kolaborasi perempuan Indonesia dalam memberdayakan Balai Perempuan adalah bagian dari analisis feminisme.

Penelitian ini dioperasionalkan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Balai Perempuan mendorong munculnya inisiatif perempuan untuk menghadapi berbagai faktor pelemah pemberdayaan?

Untuk mengetahui upaya dan strategi Balai Perempuan dalam mendorong tumbuh kembangnya inisiatif perempuan. Yaitu menggali motivasi perempuan bergabung menjadi anggota Balai Perempuan. Mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi pada anggota maupun Balai Perempuan.



2. Bagaimana hubungan Balai Perempuan dengan anggota, pengurus dan struktur yang lebih tinggi ?

Untuk memahami bagaimana perempuan menerjemahkan dan menganalisa kekuatan internal Balai Perempuan. Mengenal pola relasi yang mereka lakukan dengan struktur yang lebih tinggi serta analisa mereka terhadap kenyataan hidup mereka sendiri. Hal ini perlu dikaji karena meskipun perempuan dapat mengidentifikasi, menjelaskan dan menganalisa kekuasaan yang melemahkan mereka, namun seringkali perempuan tidak memiliki harapan untuk pemberdayaan mereka sendiri dalam kondisi dan situasi dimana mereka berada..

3. Kemungkinan-kemungkinan pemberdayaan apa yang dilakukan di Balai Perempuan di Padang Pariaman pada kehidupan nyata mereka, dihadapkan pada akses perempuan terhadap ekonomi, kesehatan dan partisipasi politik?⁴

Perempuan hanya dapat diberdayakan melalui agensi mereka –yakni, lewat refleksi, keputusan dan tindakan-tindakan mereka sebagai *subjek* dari pemberdayaan mereka sendiri. Melalui hal tersebut, penelitian ini akan mencermati kemungkinan-kemungkinan pemberdayaan apa yang dilihat perempuan sendiri yang tergabung dalam Balai Perempuan di kehidupan mereka, sekaligus melihat sejauh mana kontribusi Balai Perempuan mendorong tumbuhnya inisiatif tersebut. Selain itu, penelitian ini juga melihat kejelian perempuan mengidentifikasi sumber kekuasaan sekaligus kekuatan mereka. Diharapkan sumber kekuasaan dan kekuatan tersebut dapat digunakan oleh mereka (perempuan) dalam berbagai situasi dan di area-area hidup mereka.

4. Bagaimana Balai Perempuan berjejaring dengan pemangku kepentingan dan organisasi lainnya dalam merujuk, menahan, dan menghadapi tantangan pemberdayaan?.

Untuk melihat hubungan Balai Perempuan dengan organisasi lain, aparat pemerintahan, kerapatan adat dan lain-lain .

1.5 Penentuan Wilayah Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten dan Kota Padang Pariaman tepatnya di desa Bato Padasunan, Desa Taluk dan Korong Bungin yang berada di Nagari Lareh Nan Panjang. Alasan utama pemilihan lokasi Penelitian WEMC di Sumatera Barat ini secara umum karena [1]

⁴ *Ibid*

sistem kekerabatan masyarakatnya yang matrilineal, di mana garis keturunan berdasarkan garis ibu. Hal ini membuatnya berbeda dengan propinsi lain yang ada di Indonesia. Selain itu, sistem adat matrilineal ini masih dianggap mengagungkan kedudukan perempuan, meski yang dalam realitasnya ternyata tidaklah demikian. [2] Mengingat ada organisasi massa Koalisi Perempuan Indonesia hingga level desa dengan nama Balai Perempuan yang aktif dan kritis dalam memberdayakan perempuan. Salah satu yang ingin dilihat adalah bagaimana dinamika Balai Perempuan dalam struktur organisasi Koalisi Perempuan Indonesia di Sumatera Barat dan juga bagaimana dinamika pemberdayaan di internal anggotanya sendiri.

1.6 Penentuan Responden

Dalam menentukan narasumber, tim peneliti Koalisi Perempuan Indonesia membaginya ke dalam kriteria berikut: **Golongan 1**; perempuan miskin dan termarginal yang berinisiatif dan **Golongan 2**; perempuan yang jadi penyokong bagi perempuan lain atau perempuan yang telah berhasil mendorong (1) strategi pemberdayaan di tingkat mikro; (2) di tingkat kebijakan-kebijakan pembangunan yang ditujukan pada pemberdayaan perempuan (kesehatan, ekonomi dan partisipasi politik); (3) kelompok-kelompok sosial sipil (organisasi berbasis komunitas, organisasi perempuan) terkait dengan institusi-institusi masyarakat sipil lainnya. Pemangku Kebijakan yang bersinggungan dengan penelitian ini ditempatkan sebagai informan.

Sepanjang penelitian, narasumber golongan 1 berjumlah 56 (lima puluh enam) orang perempuan, sementara gol 2 berjumlah 17 (tujuh) orang perempuan. Sedangkan informan sebanyak 22 orang dengan komposisi 14 (empat belas) orang perempuan dan 8 (delapan) orang laki-laki yang kami gali informasinya, untuk menguatkan dan menambahkan informasi penelitian ini.

BAB II SEKILAS TENTANG KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

1. Sejarah dan bentuk organisasi Koalisi Perempuan Indonesia

Koalisi Perempuan Indonesia merupakan bagian integral dari Gerakan Massa pro Demokrasi lainnya yang ikut andil dalam perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Berbagai faktor mendorong gerakan meruntuhkan kekuasaan Orde Baru yaitu adanya krisis moneter yang sejak tahun 1997. memburuknya ekonomi Indonesia, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) semakin merajalela, kemiskinan terus meningkat. Ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya protes dan pembangkangan sosial. Reaksi ketidakpuasan masyarakat ini dijawab dengan tindakan represif seperti penangkapan, penghilangan orang dan penembakan yang mendorong muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa yang kemudian mendapat sokongan penuh dari rakyat termasuk di dalamnya kaum perempuan. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998.⁵



Merespon situasi di atas, pada tanggal 18 Mei 1998 sekitar 75 orang aktivis perempuan dari seluruh Indonesia termasuk dari Timor Leste berkumpul di Jakarta dan bersepakat untuk mendirikan sebuah organisasi yang pro pada gerakan perempuan. Dari hasil pertemuan inilah kemudian lahir Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi Setelah dua hari berselang, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

Koalisi Perempuan Indonesia merupakan bagian integral dari Gerakan Massa pro Demokrasi lainnya yang ikut andil dalam perlawanan terhadap rezim Orde Baru.

Sebagaimana juga tercantum dalam naskah pembukaan Anggaran Dasar Koalisi Perempuan Indonesia, bahwa pendirian organisasi Koalisi Perempuan Indonesia merupakan respon kalangan perempuan dalam momentum perlawanan Gerakan Perempuan, Mahasiswa dan Kelompok Pro demokrasi lainnya terhadap rezim otoriter Pemerintahan Orde Baru. Umum diketahui bahwa rezim Orde Baru sudah menghancurkan gerakan perempuan dengan penyeragaman/penunggalan ideologi dan wacana yang merugikan perempuan serta diskriminasi terhadap perempuan.⁶

⁵ Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, empat mahasiswa Universitas Trisakti meninggal akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai "Pahlawan Reformasi". Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

⁶ Hasil penelitian Saskia berhasil menggambarkan bagaimana rezim Orde Baru menghancurkan gerakan perempuan. Lihat Saskia Eleonora Wieringa, "Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia", Garda Budaya & Kalyanamitra, Jakarta, 1999.

Koalisi Perempuan Indonesia dikukuhkan sebagai organisasi masa berbasis keanggotaan individu dalam Kongres Nasionalnya Pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada Kamis, 17-18 Desember 1998.

Pemilihan tempat, di Yogyakarta dan pilihan tanggal dan bulan berdekatan dengan peringatan 22 Desember, dimaksudkan untuk menegakkan kembali tonggak pergerakan perempuan Indonesia yang telah dimulai sejak 22 Desember 1928, yang selanjutnya disebut Hari Ibu dan diubah sebagai Hari Pergerakan Perempuan.

Sejak Tahun 1999 hingga 2001, Koalisi Perempuan Indonesia menyelenggarakan Kongres Wilayah untuk pendirian Koalisi Perempuan di tingkat propinsi, antara lain Kongres Wilayah : Jabodetabek, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Jawa Timur, Bengkulu, Sulawesi Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melalui pendirian Koalisi perempuan tingkat Wilayah ini, diharapkan pengurus wilayah kemudian membentuk cabang,-cabang.

2. Dinamika Strategi Pengorganisasian dalam Koalisi Perempuan Indonesia

a. *Top Down Strategy*

Strategi Top Down dilakukan pada tahun 1998-2002, dengan membentuk struktur Koalisi Perempuan dari tingkat atas, yaitu Koalisi Perempuan Tingkat Propinsi yang disebut dengan tingkat Wilayah.

Perubahan politik nasional, terutama sejak diberlakukannya UU No 22 Tahun `1999 tentang Pemerintahan di Daerah yang memberikan otonomi seluas-luasnya pada pemerintahan Kabupaten/kota, pengurus-pengurus wilayah Koalisi perempuan didorong untuk mengembangkan organisasi dengan membentuk cabang-cabang melalui Konferensi cabang.

Pembentukan cabang-cabang ini dimaksudkan untuk membangun legitimasi dan relevansi setiap tingkat kepengurusan dalam struktur Koalisi Perempuan dalam melakukan advokasi kebijakan publik. Sehingga setiap pengurus cabang dapat melakukan berbagai upaya dialog kebijakan, pendidikan masyarakat dan membangun opini publik untuk lahirnya kebijakan yang adil bagi perempuan, anak dan kelompok marginal lainnya.

Selain pendirian cabang-cabang, menyesuaikan struktur sistem pemerintahan di daerah, Koalisi Perempuan Wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) dipisah menjadi Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah DKI Jakarta dan Koalisi Perempuan Cabang Tangerang, Koalisi Cabang Bekasi dan Koalisi Perempuan Cabang Depok. Sedangkan Bogor belum dapat dibentuk struktur Koalisi Perempuan Cabang karena jumlah anggota di Bogor yang masih relatif kecil. Koalisi Perempuan Cabang Bekasi, Cabang Tangerang dan Cabang Depok menjadi bagian dari Koalisi Perempuan Wilayah Jawa Barat.

Ketika terjadi pemekaran daerah, dimana Banten berdiri sendiri sebagai Propinsi, Koalisi Cabang Tangerang yang merupakan bagian dari Propinsi Banten, dipisahkan dari Koalisi Perempuan Wilayah Jawa Barat.

Dalam perjalannya, pembentukan cabang dan kerja-kerja advokasi oleh anggota tidak dapat dilakukan dengan baik karena keanggotaan yang tersebar di berbagai tempat . keanggotaan individu yang terpecah diberbagai tempat ini mempersulit pengorganisasian dan pemberdayaan anggota. Sedangkan advokasi kebijakan publik, tidak dilakukan berdasarkan pengalaman dan kebutuhan anggota Koalisi Perempuan , sebagaimana diharapkan, melainkan dilakukan berdasarkan penelitian, pemetaan masalah dan kajian yuridis. Hal ini dilakukan karena pengurus tidak dapat menjangkau anggota.yang tidak terorganisir..

Dalam Evaluasi Perkembangan Koalisi Perempuan bersama pengurus Nasional, Pengurus Wilayah, Dewan Pakar dan Dewan Penasihat, pada tahun 2000, disepakati bahwa untuk mengorganisir anggota Koalisi Perempuan perlu di bentuk Balai-Balai Perempuan ⁷

⁷ Usulan Pengembangan Balai Perempuan diusulkan oleh Kemala Chandra Kirana, anggota Dewan Pakar periode 1998-2003.

Balai perempuan harus dibentuk di tingkatan komunitas atau desa atau bagian dari desa, sehingga dapat efektif dalam membahas permasalahan perempuan dilingkungan tersebut beserta upaya-upaya penyelesaian yang akan diupayakan.

b. Bottom up strategy

Uji coba membangun Balai Perempuan dilakukan pada tahun 2000-2002. Balai Perempuan yang pertama kali dibangun adalah Balai Perempuan di Muara Angke, Jakarta Utara. Balai Perempuan menyelenggarakan pertemuan rutin setiap bulan untuk membahas perkembangan organisasi, menambah jumlah anggota, membangun persaudaraan sesama perempuan, memperjuangkan pemenuhan Hak Asasi Manusia, seperti advokasi kepada Perusahaan Air Minum untuk meminta perbaikan kualitas air minum dan perbaikan layanan bagi pelanggan, advokasi kepada Gubernur DKI Jakarta sehubungan dengan hilangnya Hak Pilih Perempuan dalam pemilihan Dewan Kelurahan.

Pembentukan Balai Perempuan dipandang efektif untuk mengembangkan organisasi dan memberikan manfaat bagi anggotanya. Selain pertemuan rutin bulanan menjadi tempat untuk membahas berbagai masalah, merencanakan strategi advokasi, Balai Perempuan juga digunakan untuk membangun usaha-usaha ekonomi.

Keberhasilan dalam membangun Balai Perempuan akhirnya ditanggapi oleh pengurus-pengurus wilayah dengan merencanakan membuat Cabang-cabang dimuali dari membangun Balai-Balai perempuan. Sekurang-kurangnya terbentuk tiga (3) balai Perempuan merupakan syarat mendirikan cabang.

Laporan tentang pengalaman pengembangan dan rencana pengembangan Balai Perempuan dalam Buletin Semai edisi XXI April 2002 dengan harapan laporan ini akan memberikan semangat bagi setiap anggota dan pengurus untuk selanjutnya lebih mengembangkan Balai Perempuan.

Maka Pada Rapat Kerja Nasional Tahun 2002, ditetapkan bahwa pembentukan Balai Perempuan harus menjadi strategi yang bersifat dari bawah ke atas (*Bottom Up*) dalam membentuk struktur organisasi.

3. Dampak perubahan strategi terhadap pertumbuhan organisasi

Perubahan strategi dari pembentukan Koalisi Perempuan Indonesia tingkat wilayah menjadi pembentukan Balai Perempuan dahulu kemudian membentuk cabang dan wilayah memberikan dampak :

1. Organisasi memiliki kejelasan arah untuk membangun dan mengembangkan struktur organisasi.
2. Organisasi memiliki kejelasan arah untuk mengembangkan Koalisi Perempuan Indonesia sebagai organisasi kader.
3. Pengorganisasian ditingkat dasar yaitu tingkat Desa atau komunitas mempermudah identifikasi problem dan solusi yang akan dipilih dalam kerangka kerja advokasi.
4. Penambahan anggota melalui Balai-Balai Perempuan lebih cepat dan lebih mudah mengelola, dibanding penambahan anggota bersifat individu yang terpisah-pisah.
5. Pertumbuhan jumlah anggota diimbangi dengan pengelolaan komunikasi anggota, melalui pertemuan rutin bulanan.
6. Berjalannya sistem iuran atau sumbangan anggota, dalam bentuk uang, tenaga ataupun sarana untuk memelihara organisasi di tingkat balai Perempuan

4. Dampak perubahan strategi terhadap anggota organisasi

Selain memberikan dampak pada pertumbuhan organisasi, perubahan strategi dari Top Down menjadi Bottom Up Strategy juga memberikan dampak positif bagi anggota. Dampak positif perubahan strategi adalah:

1. Anggota-anggota dalam Balai perempuan lebih terorganisir dan lebih memiliki kejelasan arah dalam melakukan kegiatan terkait dengan kepentingan mereka.
2. Anggota Balai Perempuan berkumpul sebagai perempuan, membahas permasalahan riil yang dihadapi di lingkungan mereka serta merumuskan sendiri upaya untuk menyelesaikannya.
3. Terpenuhinya kebutuhan anggota atas kesempatan berkumpul bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas melalui peningkatan pengetahuan dan informasi.
4. Terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri dalam mengemukakan pendapat, mengembangkan inisiatif individu, mengaktualisasikan diri dan memelihara sikap toleransi serta menghormati pendapat orang lain yang berbeda.
5. Terbukanya ruang bagi perempuan untuk berbagi pengalaman dan mengemukakan persoalan pribadinya maupun persoalan lingkungan
6. Terbukanya ruang bagi perempuan untuk membangun sistem dukungan sesama perempuan baik dukungan secara ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Termasuk di dalamnya membangun sistem dukungan bagi korban Kekerasan Terhadap Perempuan.

BAB III

Ide Lahir dan Tumbuhnya Balai Perempuan

1. Lahirnya Balai Perempuan

Ide dibuatnya Balai Perempuan merupakan jawaban atas pertanyaan : Apa yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya, setelah Koalisi Perempuan di tingkat Wilayah didirikan dan bagaimana mewujudkan visi misi Koalisi Perempuan melalui Koalisi Perempuan di tingkat wilayah. Disadari bahwa organisasi dengan cakupan wilayah atau propinsi mengalami berbagai kesulitan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, maka perlu dibangun struktur yang lebih kecil, yang mampu menjangkau semua anggota dalam cakupan yang kecil itu. Maka disepakatilah usulan dewan Pakar untuk membentuk Balai Perempuan, sebagai wadah untuk membangun gerakan politik di tingkat basis.

Balai Perempuan berarti wadah atau tempat dimana perempuan-perempuan datang berkumpul dan berserikat untuk menyampaikan pikiran, pendapat ataupun permasalahannya. Dalam Balai ini pula diharapkan ada pembahasan yang mendorong munculnya ide-ide untuk penyelesaian masalah. Balai Perempuan melainkan perkumpulan tempat mestinya tidak jadi berkumpul dimana saja, balai, atau di ruang di mana saja sesuai

Balai Perempuan berarti wadah atau tempat dimana perempuan-perempuan datang berkumpul dan berserikat untuk menyampaikan pikiran, pendapat ataupun permasalahannya

bukanlah gedung secara fisik, perempuan itu sendiri. Soal masalah. Perempuan dapat bergantian di rumah anggota pertemuan desa, di kebun atau kesepakatan anggota balai.

Pada hakikatnya, Balai untuk mengembalikan Hak menyampaikan pendapat tertulis, sebagaimana di undang Dasar 1945 (UUD mengatur dan menjamin hak tersebut, namun selama pemerintahan Presiden Soeharto, hak berkumpul dan berserikat tersebut tidak dapat dinikmati oleh masyarakat pada umumnya. Pada masa kekuasaan Soeharto, setiap orang yang akan berkumpul lebih dari sepuluh orang harus melapor dan memperoleh ijin dari ketua Rukun Tetangga, Kepala Desa bahkan sampai Polisi setempat. Sering kali ijin tidak diberikan, atau jika diberikan ijin berkumpul tersebut, beberapa aparat keamanan berpakaian preman melakukan pengawasan. Prosedur berbelit dan pola intimidasi inilah yang kemudian menyebabkan perempuan takut dan enggan berkumpul dan berserikat.

Perempuan adalah upaya Berkumpul dan berserikat dan baik secara lisan ataupun jamin dalam Pasal 28, Undang-1945). Meski UUD 1945 telah

Balai Perempuan yang pertama berdiri adalah Balai Perempuan Kampung Nelayan Muara Angke Jakarta, pada awal tahun 2001. Balai ini sangat progresif, dalam melakukan kerja-kerja advokasi antara lain melakukan Dengar Pendapat (*Hearing*) dengan Pimpinan Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya agar kualitas air dan layanan PAM bagi kampubg nelayan ditingkatkan. Pimpinan dan anggota Balai Perempuan juga melakukan hearing dengan Pemerintah Daerah (gubernur DKI) untuk membahas persoalan Dewan Kelurahan (Dekel), sampah, Pembagian Beras untuk kelompok miskin dan penggusuran yang terjadi

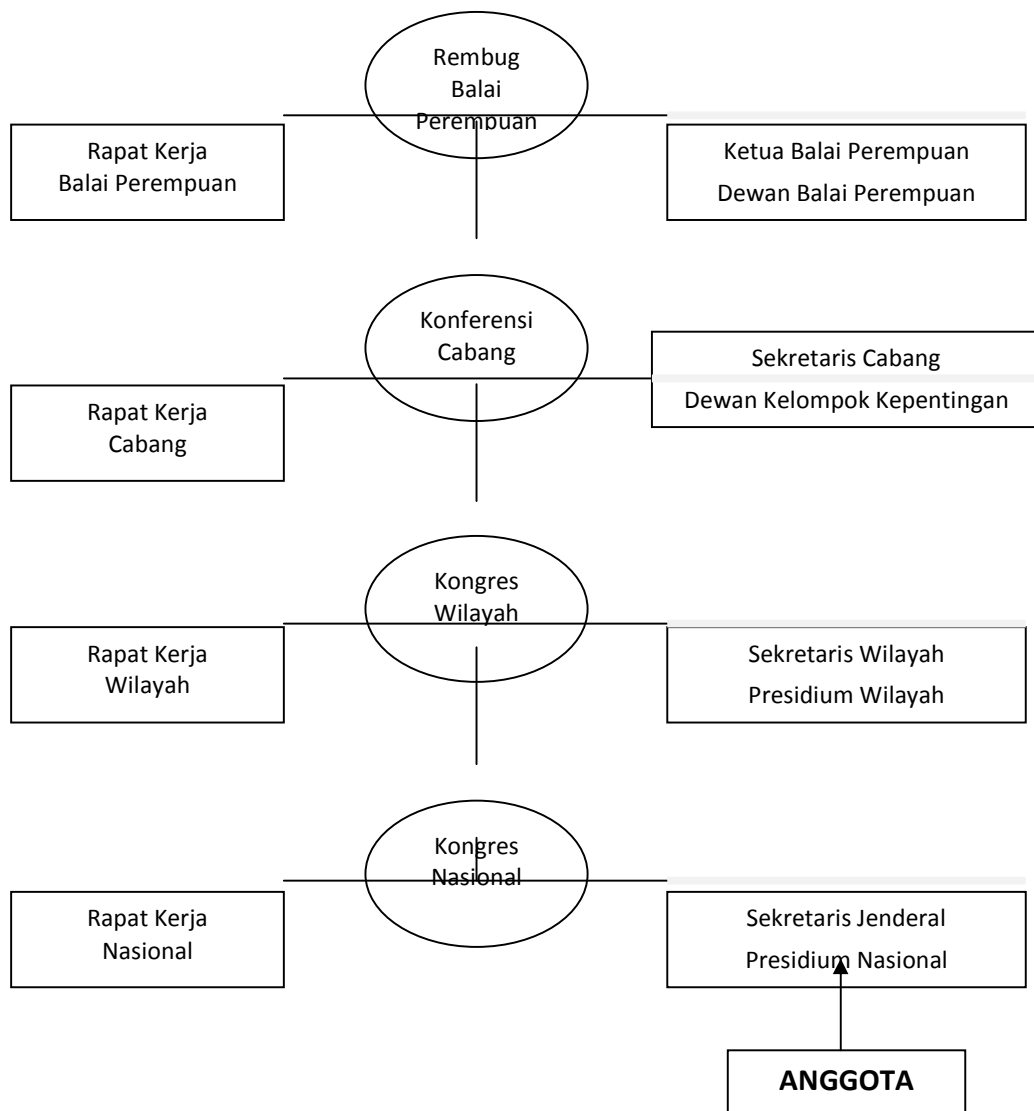


dilingkungan mereka. Pada 21 Juni 2001 Balai ini melakukan Dengar pendapat dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas ketentuan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengakibatkan nelayan tidak dapat melaut karena mahalnya BBM.

Selanjutnya, berdiri Balai Perempuan Sendang Biru, Sumber Manjing Wetan, Malang Selatan pada 10 Februari 2002, Balai Perempuan "Perjuangan Damai" di desa Sri Kuncoro, Bengkulu pada 17 Februari 2002, Balai Perempuan Polaman Baru, Argorejo, Sedayu Bantul, Yogyakarta, dan berbagai Balai Perempuan di berbagai tempat.

Tahap selanjutnya, Balai Perempuan diformalkan dalam aturan Anggaran Rumah Tangga, sebagai syarat pembentukan cabang Koalisi Perempuan Indonesia. Yaitu pembentukan tiga Balai Perempuan dalam satu Kabupaten/kota sebagai syarat pembentukan cabang. Pembentukan struktur organisasi yang mulanya dilakukan dari Wilayah-Cabang- BP maka diubah menjadi BP-Cabang-Wilayah perubahan ini menjadi titik kemajuan dalam hal nilai-nilai keormasan.

STRUKTUR DAN FUNGSI KOALISI PEREMPUAN INDONESIA



2. Perempuan berbicara tentang kehidupan dalam balai

Balai Perempuan merupakan wadah bagi perempuan untuk membahas berbagai persoalan kehidupan. Perempuan dalam Balai Perempuan dapat membahas problem tentang masa depan, beban ganda yang dialami dalam rumah tangga, problem keuangan, pendidikan, dan kesehatan, pengasuhan anak, persoalan kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai persoalan maupun keberhasilan dalam kehidupan yang mereka hadapi.

Melalui berbagi pengalaman ini perempuan dalam balai perempuan ini, perempuan saling mendidik dan saling mendukung. Diharapkan, melalui relasi saling mendukung ini perempuan memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan, baik kehidupannya secara pribadi, kehidupan dalam rumah tangga maupun kehidupan dalam masyarakat.

3. Menjadikan Balai sebagai kekuatan pemersatuan dalam gerakan.

Dalam lingkungan desa (atau istilah sejenisnya seperti: Nagari, Gampong dst) dan komunitas, Balai Perempuan menjadi kekuatan pemersatu gerakan dalam berbagai upaya peningkatan kualitas kehidupan perempuan dan anak. Balai Perempuan bekerja sama dengan berbagai organisasi yang ada dilingkungannya seperti PKK, Posyandu, Fatayat NU, Muslimat NU, Aisyah, Wanita Katholik, dan kader-kader organisasi lain yang ada dalam desa/komunitas tersebut.

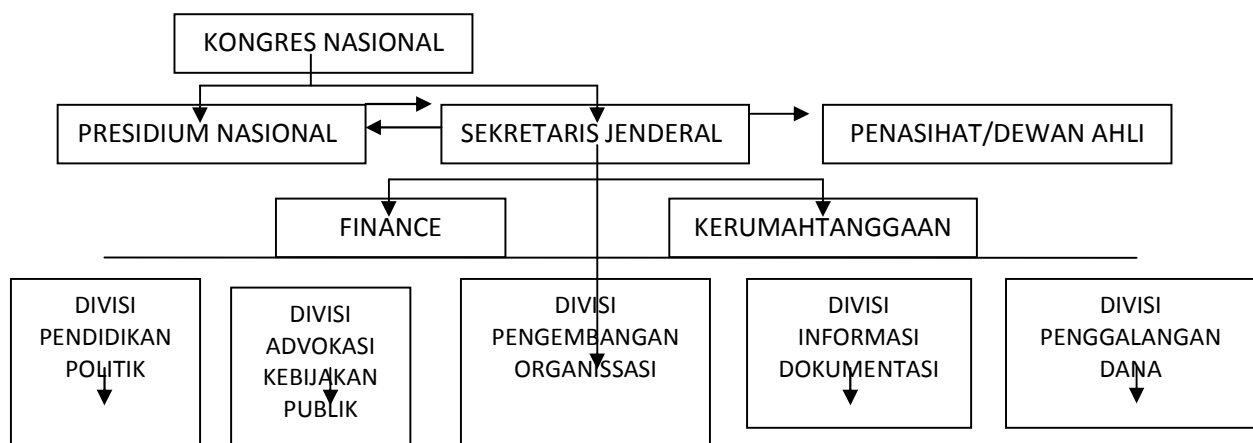
Melalui kerja berjejaring antara kader-kader tersebut, Balai Perempuan berperan menjadi kekuatan pemersatu. Bahkan, anggota Balai Perempuan sekaligus menjadi anggota organisasi perempuan lain di desa tersebut, sehingga koordinasi dan kerja sama lebih mudah dilakukan. Balai Perempuan dipandang lebih efektif untuk mempertemukan semua kelompok di tingkat basis, karena dipandang sebagai organisasi yang bersifat netral, karena Koalisi Perempuan Indonesia memiliki identitas sebagai organisasi yang non sektarian dan non partisan.

Meski demikian, beberapa Balai Perempuan di beberapa wilayah memelihara kontinuitas pertemuan rutusnya melalui media-media yang umum digunakan oleh perempuan seperti pengajian, arisan maupun koperasi.

4. Balai Perempuan dalam ruang dan waktu

Jika dilihat dari garis struktur maka terlihat dengan jelas bahwa di Sekretariat Nasional (Setnas), Sekretaris Jenderal (Sekjen) memiliki 5 divisi yaitu; Pengembangan Organisasi, Advokasi Kebijakan Publik, Pendidikan Politik, Informasi dan Dokumentasi serta Fundraising yang membantu untuk menjalankan program sebagai amanat Kongres Nasional. Fungsi kesekretariatan adalah menjalankan visi, misi dan rencana kerja yang telah disepakati dalam Rapat Kerja Nasional, memberikan dukungan dan fasilitasi bagi pengurus tingkat wilayah dan cabang agar dapat menjalankan organisasi dan melayani anggota.

STRUKTUR SEKRETARIAT NASIONAL



Sedangkan di tingkat wilayah dan cabang perangkat kerja disesuaikan dengan kebutuhan lokal, namun sekurang-kurangnya bekerja di tiga area utama yaitu; pengembangan organisasi, pendidikan politik dan advokasi. Sedangkan Struktur Balai Perempuan sepenuhnya diserahkan pada kebutuhan lokal, keleluasaan dan kemudahan bagi pengurus di Balai Perempuan karena mereka lebih tahu kebutuhan di lingkungannya.

Pengelolaan Balai Perempuan tidak terlepas dari ruang dan waktu dimana Balai tersebut berada. Kebiasaan masyarakat setempat, permasalahan yang dihadapi masyarakat, relasi pimpinan dan anggota Balai dengan kekuatan sosial dan politik di lingkungannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan Balai Perempuan. Misalnya, Balai di suatu desa yang memiliki Kepala desa sangat demokratis dan kooperatif dengan masyarakat akan lebih cepat berkembang. Berbagai kemudahan diperoleh Balai Perempuan tersebut, seperti penggunaan ruang pertemuan Gedung milik pemerintah desa, pelibatan anggota Balai sebagai fasilitator desa atau panitia berbagai kegiatan di desa. Namun Balai Perempuan yang berhadapan dengan pimpinan desa atau pimpinan komunitas yang anti politik, karena masih terpengaruh politik Rezim Soeharto yang melarang masyarakat berpolitik, maka berbagai rintangan dihadapi oleh Balai Perempuan.

Balai Perempuan, berkembang sesuai dengan masalah di lingkungan tempat Balai tersebut berada. Balai Perempuan di desa atau komunitas yang memiliki anggota dan warga masyarakat pasangan usia muda dan memiliki anak-anak usia di bawah lima tahun, anggota Balai akan membangun Tempat penitipn anak, Pos Pelayanan terpadu dan menyelenggarakan sarana bagi Pendidikan Usia Dini. Sedangkan beberapa Balai yang berkembang di lingkungan religius, pemeliharaan rutinitas pertemuan anggota balai dilakukan melalui aktifitas keagamaan seperti pengajian (di beberapa tempat menggunakan istilah Yasinan) dan atau persekutuan do'a.

BAB IV PEREMPUAN DALAM RANAH MINANG

1. Minang sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Otonomi Daerah

Di masa Orde Baru, pemerintah pusat menerapkan UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Model birokrasi modern dimasukkan ke desa untuk menata mekanisme administrasi dan kelembagaan desa. Desa dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan birokrasi dari istana negara, kementerian dalam negeri, propinsi, kabupaten hingga kecamatan. Pemerintah pusat melakukan penyeragaman (regimentasi) terhadap seluruh unit pemerintahan terendah menjadi nama “desa”, sebagai upaya untuk memudahkan kontrol dan korporatisasi terhadap masyarakat desa. Struktur birokrasi sipil dan militer dirancang secara hirarkhis dan paralel dari Jakarta sampai ke pelosok desa. Hirarkhi birokrasi sipil secara simultan berjalan dari Departemen Dalam Negeri, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa. Depdagri adalah pengendali hirarkhi birokrasi sipil, yang bertanggung jawab pada struktur di atasnya, yakni istana negara (Presiden).⁸ Semua ini dimaksudkan untuk menciptakan keamanan, ketahanan, kerukunan dan ketertiban desa yang terkendali atau menciptakan stabilitas dan katahanan desa.



Pendekatan stabilitas dan ketahanan desa ini merupakan bentuk penghancuran terhadap kearifan lokal, keragaman identitas lokal, maupun adat-istiadat lokal serta meneguhkan posisi kepala desa sebagai “penguasa tunggal” di desa. Kepala desa lebih berorientasi ke atas (kepada camat dan Bupati) daripada sebagai pemimpin desa yang memperoleh legitimasi kuat di hadapan masyarakat. Akibatnya terjadi benturan antara kepala desa dengan pemimpin adat maupun masyarakat.

Selain terjadi negaranisasi (negara masuk desa dan desa dimasukkan ke dalam negara), di masa Orde Baru juga terjadi pembangunanisasi (pembangunan masuk ke desa dan desa dimasukkan dalam agenda besar pembangunan) melalui pengenalan konsep pembangunan desa terpadu sejak 1970-an. Kebijakan pembangunan desa terpadu dilancarkan melalui gerakan revolusi hijau, program penanggulangan kemiskinan, program Inpres Desa, maupun program-program bantuan lain, bahkan berbagai program dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer, seperti ABRI masuk Desa⁹.

Menurut keterangan seorang Kepala desa di zaman Orde Baru, semua departemen di Jakarta, kecuali Departemen Luar Negeri, mempunyai program pembangunan di tingkat desa. Sehingga tidak bisa menghitung lagi berapa jumlah dana yang dialokasikan ke desa. Semua program pembangunan desa terpadu ini secara umum dimaksudkan untuk mengangkat derajat

⁸ Paralel dengan hirarkhi birokrasi sipil adalah hirarkhi militer dari Dephankam/Mabes TNI, Kodam di Propinsi, Korem di wilayah pembantu gubernur, Kodim di Kabupaten/Kotamadya, Koramil di Kecamatan, dan Babinsa di Kelurahan/Desa.

⁹ ABRI masuk Desa adalah bagian dari pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yaitu Fungsi Politik sosial dan budaya dan Fungsi pertahanan dan keamanan. ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) sekarang disebut Tentara Nasional Indonesia, setelah kepolisian dipisahkan dari angkatan militer.

hidup orang desa, melalui perbaikan dan pembangunan prasarana fisik desa, akses transportasi dan transaksi ekonomi, layanan dasar bagi orang desa, memerangi kemiskinan dan kebodohan. Namun Program bantuan ini tidak meningkatkan kapasitas dan kemandirian (otonomi) desa, melainkan justru menciptakan ketergantungan abadi desa terhadap bantuan pemerintah.

Desa memasuki babak baru, ketika desentralisasi dan demokrasi lokal mengalami kebangkitan, menyusul lahirnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan di Daerah. Desentralisasi dan demokrasi lokal dipandang sebagai solusi bagi pengelolaan pemerintahan dan pembangunan untuk mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan pemerintahan lokal yang transparan dan akuntabel, serta memperkuat partisipasi masyarakat lokal.

Sebagai tindak lanjut dari Otonomi Daerah, pemerintah Sumatera Barat, menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2000 yang mengatur tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Semangat “Kembali ke Nagari” ini untuk lebih mengembangkan potensi daerah dengan nilai-nilai lokalitas yang tumbuh di masyarakat Sumatera Barat. Lebih dari itu, adanya pengakuan dari pemerintahan nagari terhadap elemen-elemen masyarakat yang dalam khazanah trias politika hanya terdiri atas tiga komponen, menunjukkan besarnya ruang partisipasi masyarakat. Hal ini ditandai dengan dimasukkannya Badan Permusyawaratan Adat dan Syarak Nagari dalam Pengurusan Nagari.¹⁰

2. Tata Kehidupan di ranah Minang

Elemen utama yang mendasari adat Matrilineal Minangkabau adalah seperangkat aturan mengenai garis keturunan dan warisan, pengambilan keputusan, tanah milik bersama, dan tradisi merantau.

a. Garis Keturunan

Banyak penamaan unit tempat tinggal dan silsilah keturunan nama yang beragam. Pemaparan di bawah ini merupakan sistem yang sederhana di Bukit Tinggi, dan sesuai yang dinyatakan oleh Josselin de Jongs sintesis pada matrilineal Minang sebelumnya.

Unit ekonomi dan tempat tinggal terkecil disebut *parui*, tempat orang Minang tinggal dalam rumah *gadang*, rumah panjang dengan dua atau tiga tanduk. Banyaknya tanduk secara harfiah menunjukkan jumlah perempuan yang telah menikah dalam rumah tersebut. Setiap unit pada umumnya terdiri dari seorang perempuan dengan anak-anak perempuannya yang telah menikah dan yang belum menikah, anak laki-lakinya, cucu-cucunya dari anak-anak perempuannya yang telah menikah. Suami akan mengunjungi istrinya pada malam hari, tetapi para suami ini tidak pernah tinggal dengan istrinya dalam rumah tersebut. Perempuan kepala *parui* disebut *limpape*, istilah lainnya adalah *bundo kanduang*. Dalam kampung, *parui* yang berbeda tinggal bersama. Cluster dari kampung disebut nagari, dikenal sebagai wewenang tertinggi. Klan utama sistem kekerabatan Minang disebut suku. Aturan perkawinan secara umum adalah suku exogamy¹¹ dan endogamy¹² nagari. Garis keturunan dan pewarisan diatur melalui garis ibu. Tidak ada keputusan mengenai tanah milik bersama dapat diambil tanpa persetujuan dari *limpape*.

b. Pengambilan Keputusan

Adat Minangkabau merupakan pusat ideologi egaliter dan keyakinan yang besar terhadap nilai-nilai demokrasi. Jenderal Belanda De Stuers menulis pada tahun 1825 bahwa Orang Minang mempertahankan kebebasan individu dan hanya sedikit perbedaan antara

¹⁰ Badan ini terdiri dari utusan Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kanduang dan Komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang di nagari. Lihat Perda No. 9 Tahun 2000 Bab III Pasal 5 ayat 3.

¹¹ Exogamy adalah perkawinan antar suku di luar sukunya sendiri di dalam satu nagari yang sama

¹² Endogamy adalah perkawinan dilakukan dalam kampung-kampung yang berasal dari nagari yang sama

pemimpin dengan para pengikutnya. Meskipun, laki-laki merupakan perwakilan di publik dari anggota-anggota keturunannya, namun tak ada keputusan yang dapat diambil tanpa persetujuan dari perempuan yang secara kolektif berwenang terhadap tanah milik bersama.

Mamak, atau saudara laki-laki ibu, bertanggung jawab terhadap anak-anak saudara perempuannya, disebut *kamanakan*. Kepala laki-laki di *parui* disebut penghulu; penghulu kampung, bersama dengan para penasehatnya bertanggung jawab terhadap berbagai urusan kampung. Istilah lain dari penghulu adalah *datuk*. *Penghulu*. Penghulu tidak memiliki kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk bertindak); peran penghulu adalah membawa berbagai permintaan dan perhatian dari keluarga kepada penghulu lainnya. Loeb menyatakan bahwa jika *penghulu* gagal bertindak sebagai wakil keluarga dalam menyampaikan permintaan dan perhatian keluarga, maka keluarga akan menggantinya.

Secara tradisional, *datuk* atau *penghulu* secara umum dipilih. *Penghulu* dari berbagai kampung, disebut nagari. Nagari memiliki dewan, yang memiliki wewenang tertinggi. Tak ada wewenang tertinggi lainnya yang diketahui. Karenanya, masyarakat Minang dapat dikarakteristikan sebagai sebuah nagari yang demokratis dengan tingkat otonomi regional yang tinggi.

Pendapat ini, satu sisi secara prosedural ada benarnya, namun dalam prakteknya hari ini kita perlu melihat kembali apakah benar-benar demokratis dalam arti menyertakan perempuan dalam hal perumusan maupun pengambilan keputusan politik yang .

c. Tanah Milik Bersama

Aturan-aturan adat mengenal dua jenis relasi-relasi tanah milik. *Harta pusaka*, seperti tanah dan rumah-rumah, jatuh di bawah kepemilikan bersama klan ibu dan perempuan, serta diwariskan menurut aturan matrilineal, garis ibu. *Harta pencaharian* merupakan milik individu, yang didapat oleh laki-laki selama hidupnya. Namun demikian, harta pencaharian ini menjadi pusaka, yang juga diwariskan secara garis ibu, melalui anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan laki-laki, khususnya jika baru membuka sawah. Namun, ada kemungkinan harta pencaharian ini diberikan laki-laki kepada anak-anaknya sendiri sebagai hadiah formal, yang dalam aturan Islam dikenal dengan istilah *hibah*. Menurut Kato, *hibah* mejadi lebih umum pada abad 19.

Secara tradisional, tanah pusaka tidak dapat dijual oleh anggota-anggota klan secara individual. Tanah dapat digadaikan ketika ada kebutuhan uang untuk memenuhi syarat-syarat adat, seperti, penguburan anggota keluarga, perkawinan anak perempuan, memperbaiki rumah gadang atau pelantikan pemimpin garis keturunan.

d. Merantau

Tugas-tugas perempuan berada di rumah dan lingkungan sekitarnya. Mereka sulit mendapatkan izin untuk meninggalkan rumah ibunya dan tempat tinggalnya. Laki-laki justru didorong untuk keluar dan mencari prestise dan kejayaan di tanah *rantau*, di tanah yang bukan milik orang Minang – istilah yang terlalu lepas. Kejayaan yang terkumpul akan menambah kepemilikan keturunan. Graves mengamati bahwa khususnya pada kampung yang miskin, laki-laki meromantiskan mengenai pergi merantau dan menjadi ejekan bagi laki-laki yang memilih tinggal di rumah. Meskipun, sebagaimana yang dinyatakan Naim, jenis migrasi ini merupakan basis kemunculan adanya keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri ddari ayah, ibu dan anak-anak.

3. Peran dan Posisi Perempuan di Ranah Minang

Merunut sejarah, sistem adat Minangkabau menempatkan kaum perempuan Minangkabau memiliki status istimewa dan memainkan peranan signifikan di dalam komunitas mereka Peranan-peranan penting tersebut meliputi: sebagai penerus keturunan, pemilik harta warisan

dan pengelola atau ‘manajer’ keluarga mereka masing-masing. Kaum perempuan Minangkabau memainkan peran dalam menentukan sukses dan gagalnya pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai *mamak* (paman dari pihak ibu), dan *penghulu* (kepala suku). Karenanya, Perempuan Minangkabau disimbolkan sebagai ‘*limpapeh Minang, ranah Pagaruyung*’ (pilar utama Minangkabau, tanah Pagaruyung).¹³

Hasil riset-riset peneliti masyarakat dan budaya Minangkabau sebelumnya, seperti, Joanne C Prindiville (1981), Lucy A. Whalley (1993), S. Wieringa (eds,1995), Joke van Reenen (1996) and Peggy Reeves Sanday (2002), mengakui kuatnya peran perempuan Minangkabau.

Matrilineal dan Islam merupakan identitas dari Minangkabau. Hal ini tercermin dari petatah-petitih (ajaran adat secara lisan) yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Yang sangat dikenal yaitu: “*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” (Adat bersendikan syariah, syariah bersendikan kitab suci Al-Qur’an). Abdullah dan Dobbin menyatakan bahwa pepatah ini lebih bersifat ideologis yang sekaligus membuktikan bagaimana adat Minangkabau yang bersendikan matrilineal telah banyak dipengaruhi oleh Islam yang datang ke masyarakat Minangkabau sekitar abad ke 16.¹⁴

Sistem kekerabatan matrilineal adalah garis keturunan dan harta warisan diturunkan melalui garis ibu/perempuan. Sistem ini dimaksudkan untuk memberikan penghormatan dan perlindungan bagi perempuan.

Masuknya Islam ke Minangkabau dipandang sebagai menjadi salah satu kekuatan sentrifugal. Kata ‘Islam’ selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pepatah ideologis Minangkabau, walaupun dalam kaitannya dengan adat telah berubah beberapa kali.¹⁵ Rekodifikasi adat dapat dilihat dari terbentuknya *Adat Islamiah*, yang berarti *adat* yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. *Adat Islamiah* diordinasikan sebagai *adaik nan sabana adaik* (*adat* yang benar-benar *adat* sesungguhnya).¹⁶

Pengaruh Islam juga berdampak signifikan dalam perubahan struktur organisasi sosial, terutama berkaitan dengan relasi gender dan sistem pewarisan. Beberapa pengaruh masuknya nilai-nilai Islam ke dalam adat, dapat dilihat dari pergeseran dalam sistem pewarisan di masyarakat Minangkabau. seperti yang berlaku dalam budaya matrilineal. Unit keluarga terkecil dalam adat Minangkabau adalah terdiri dari seorang ibu dengan anak-anaknya, dikenal dengan istilah *samande* (satu ibu) yang dipimpin oleh seorang perempuan dalam posisinya sebagai ibu.¹⁷ Berdasarkan sistem ini pula, seorang lelaki (sebagai ayah/suami) adalah ‘*orang lua* (orang luar)’ dari keluarga matrilineal istrinya dengan posisinya sebagai *urang sumando*. Dengan demikian, anak-anaknya secara otomatis menjadi bagian dari keluarga matrilineal ibu mereka. Anak-anak tersebut bakal memakai nama suku ibu mereka, tidak nama suku ayah mereka. Seorang lelaki Minangkabau dalam fungsinya sebagai *mamak* (saudara laki-laki ibu) bertanggung jawab memelihara anak-anak dari saudata perempuannya. Bahkan dapat dikatakan hubungan seorang *mamak* dengan para *kamanakan* (anak dari saudara perempuan) secara adat, jauh lebih kuat

¹³ Pagaruyung sebelumnya adalah pusat administrasi pemerintahan para penguasa Minangkabau Aditiawarman, yang masih keturunan raja Majapahit, mendirikan kerajaan Pagaruyung pada tahun 1343 (Navis, 1984: 15).

¹⁴ Abdullah, 1966. Lihat juga Dobbin, 1974.

¹⁵ Pepatah ideologis Minangkabau asalnya berbunyi “*adat basandi alur jo patut* (adat bersendikan alur dan patut)”. Setelah kedatangan Islam, pepatah tersebut berubah menjadi “*adat basandi alur, syarak basandikan dalil* (adat bersendikan alur; Syariah bersendikan dalil Al Qur-an)”. Pepatah tersebut menunjukkan bahwa keduanya setara dan independent. Kemudian pepatah tersebut dimodifikasi menjadi “*adat basandi syarak, syarak basandi adat* (adat bersendikan syariah, syariah bersendikan adat). Modifikasi ini mengekspresikan kesetaraan mereka tetapi juga saling ketergantungan satu sama lainnya. Pepatah ini, sekali lagi, mengalami perubahan menjadi “*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Syarak, mangato, adat mamakai* (artinya Adat Minangkabau bersendikan Syariah’, Syariah bersendikan Kitab Suci Al Qur’an, syariah menetapkan, adat memakai) . pepatah ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwa posisi syariah lebih tinggi dari adat). Pepatah yang telah dimodifikasi ini masih digunakan di dalam masyarakat Minangkabau kontemporer. Lihat Abdullah, 1971, dan Azra, 2003 untuk diskusi yang lebih mendalam..

¹⁶ Abdullah, T. 1967. Lihat juga Azra, A., 2003.

¹⁷ Elfira, 2005.

dari pada hubungan seorang ayah dengan anak-anaknya. Hal ini dapat dilihat dari aturan adat yang menetapkan para kamanakanlah yang nantinya mewariskan harta warisan dan kedudukan adat (*pusako dan sako*) seorang mamak.. Hingga saat ini, Suku Minang masih menganut sistem adat matrilineal dan dipercaya mengagungkan kedudukan perempuan. Meskipun pada prakteknya, telah banyak berubah.

Both Willinck dan Korn menyatakan bahwa kekuasaan perempuan berada pada kepemilikan sawah dan kontrol mereka terhadap pendapatan yang berasal dari sawah tersebut. Korn menambahkan bahwa perempuan, khususnya yang lebih tua, berpartisipasi secara aktif dalam dewan keluarga, karena mereka merupakan ibu-ibu dari para pemimpin laki-laki di garis keturunannya. Kita sudah menyatakan kekuasaan *limpape*. Dalam proses pengambilan keputusan, perempuan tidak hanya berpartisipasi dalam berbagai pertimbangan atau pemikiran, mereka juga orang-orang yang harus menerapkan keputusan-keputusan yang dibuat secara musyawarah mufakat. Laki-laki hanya dapat memvalidasi keputusan yang diambil. Jika saat itu sedang tidak ada *mamak*, perempuan juga dapat ditunjuk dalam posisi memvalidasi tersebut.

Secara ekonomi dan politik, perempuan yang lebih tua sangat berkuasa, namun cara memperlakukan perempuan yang lebih muda, sangat dikontrol. Perkawinan anak perempuan diatur oleh perempuan yang lebih tua darinya. Anak perempuan diharuskan *masih perawan* hingga perkawinan tiba, meskipun anak laki-laki didorong untuk keluar dan mencari pengalaman. Jika pasangan tersebut merasa tidak sesuai, suami dengan mudahnya melakukan poligami atau ia bisa pergi merantau atau kabur. Ia bisa juga menceraikan istrinya menurut aturan Islam. Perempuan yang berzina akan dihukum berat. Pimpinan adat laki-laki akan bertanggung jawab terhadap hukuman tersebut atas tindakan perempuan yang berzina.

Tetapi, sekali menikah, perempuan juga memiliki kontrol terhadap dirinya. Lobes menuliskan bahwa menurut adat Minangkabau, laki-laki tidak memperoleh posisi yang menguntungkan dari perempuan yang dinikahinya. Laki-laki Minang tidak memiliki hak atas istrinya, kecuali permintaan setia istrinya pada suami. Ia kemudian mengamati bahwa jika perempuan menginginkan perceraian, isteri dengan mudahnya mengubah tempat tinggal tidurnya. Suami akan mengetahui bahwa ia tidak diinginkan lagi dan akan menghilang. Banyak informan mengatakan bahwa praktek-praktek ini, menekankan bahwa saat ini mudah sekali perempuan mendorong suaminya untuk meninggalkan mereka. Orang Minangkabau, laki-laki dan perempuan menyatakan secara empati bahwa kekerasan dan pemukulan terhadap isteri tidak terdengar di waktu dulu, dan bahkan sekarang boleh dikatakan jarang.

Hubungan-hubungan antara perempuan sendiri tergolong kuat. Perempuan, tidak hanya secara kolektif memiliki hak kepemilikan (meskipun tanah dialokasikan kepada perempuan yang telah menikah untuk penggunaan perempuan secara individu), mereka perempuan juga memperlihatkan adanya tugas-tugas yang dilakukan secara bersama.

Disyahnannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah memberikan peluang kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar pada pemerintah di tingkat kabupaten dan kota.¹⁸ Produktivitas Pemerintahan di Daerah untuk menerbitkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) pun meningkat, sebagai upaya penataan ulang dari hubungan kekuasaan yang sentralistis menuju desentralisasi di era otonomi daerah. Ironisnya, kewenangan dalam kerangka desentralisasi ini tidak selalu memberikan manfaat bagi perempuan dan masyarakat pada umumnya. Misalnya upaya formalisasi Perda diskriminatif atau inkonstitusional¹⁹ yang terjadi di sebagian besar kota atau kabupaten di Propinsi Sumatera Barat, termasuk Kota dan Kabupaten Pariaman²⁰ merupakan bentuk pelemahan peran dan kedudukan

¹⁸ Lihat Noerdin, Edriana et al (2000)

¹⁹ Perda diskriminatif adalah setiap Peraturan Daerah yang berisi perlakuan tidak adil di muka hukum karena alasan-alasan yang dilandaskan pada perbedaan kodrati.

²⁰ Perda diskriminatif atau inkonstitusional di Kota dan Kabupaten Pariaman ini berupa aturan penggunaan jilbab bagi perempuan (Perda No.....)

perempuan dalam sistem adat maupun kontrol terhadap otonomi tubuh atas perempuan. Lolosnya Perda Tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat pada No 16 tahun 2008 dimana isinya mencerabut semangat matrilineal perempuan Minangkabau, dengan cara tidak lagi melibatkan para *limpapeh* (perempuan yang dituakan) maupun *bundo kanduang* dalam pengambilan keputusan di wilayah publik, dan pengalihan kekuasaan tanah ulayat (*pusako*) kepada *ninik mamak* (paman – saudara laki-laki ibu), merupakan penghancuran makna *bundo kanduang*²¹

4. Peran dan Posisi Koalisi Perempuan Wilayah Sumatera Barat Terhadap Sumatera Barat

Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi Wilayah Sumatera Barat diinisiasi oleh 3 orang vocal point yaitu Fitriyanti, Lusi Herlina dan Lani Verayanti berasal dari satu institusi NGO perempuan Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M).

Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi Wilayah Sumatera Barat berdiri tanggal 19 Agustus 2001 melalui Kongres I yang berlangsung di Bukit Tinggi, didirikan oleh 140 orang aktifis perempuan Sumatera Barat dari 7 kelompok kepentingan (petani, ibu rumah tangga, pemuda dan mahasiswa, informal, miskin desa, miskin kota dan professional).

Pengurus periode I masa jabatan 2001-2006. Keberadaan KPI Sumbar setelah kongres I belum mengacu seperti struktur organisasi yang tertuang dalam AD/ART yang telah diperbaharui pada tahun 2002, yaitu belum terdapat KPI Cabang maupun BP.

Selama belum terbentuk Cabang dan Balai Perempuan, advokasi dalam bentuk dialog kebijakan dengan pemerintah daerah Padang, Solok dan Pariaman dilakukan oleh pengurus wilayah, fokus pada issue-issue terkait dengan reinterpretasi adat Minangkabau, Gender Budget dengan fokus terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Untuk Nagari (DAUN).

Disamping itu dilakukan pula advokasi untuk meningkatkan peran perempuan di tingkat pengambilan keputusan baik di tingkat Nagari maupun di tingkat pemerintahan Daerah, dan advokasi Peraturan Daerah yang diskriminatif terhadap perempuan seperti Perda Maksiat dan perda tentang Tanah Ulayat.

Kongres II KPI Wilayah Sumatera Barat berlangsung pada tanggal 24 Maret 2007 dihadiri oleh 350 orang anggota dengan 10 kelompok kepentingan (informal, masyarakat adat, pemuda mahasiswa, lansia, petani, miskin desa, miskin kota, kelompok dengan kemampuan berbeda, ibu rumah tangga, janda/single parent). Per Desember 2009 KPI Sumbar memiliki 1503 orang anggota yang berasal dari 5 Cabang dan 22 balai perempuan yang tersebar di Sumatera Barat.

1. Cabang Solok

Terbentuk pada tanggal 27 November 2006 dengan 8 kelompok kepentingan yaitu professional, petani, rumah tangga, informal, masyarakat adat, pemuda, lansia dan miskin desa). Jumlah anggota keseluruhan 253 orang, terdiri dari 4 Balai Perempuan sebagai berikut :

- a. BP Cupak berjumlah 56 orang
- b. BP Selayo berjumlah 63 orang
- c. BP Gantung Ciri berjumlah 26 orang
- d. BP Sungai Janiah berjumlah 44 orang

2. Cabang Padang

Terbentuk pada tanggal 20 Januari 2007 dengan 5 kelompok kepentingan yaitu professional, petani, rumah tangga, informal dan pemuda mahasiswa. Jumlah anggota keseluruhan 371 orang, terdiri dari 4 Balai Perempuan sebagai berikut :

²¹ Diskusi temuan lapangan tim penelitian KPI dan SCN-CREST, 28-30 Mei 2007

- a. BP Batu Gadang berjumlah 79 orang
 - b. BP Tabek Batu Aia Pacah berjumlah 90 orang
 - c. BP Gunung Sariak berjumlah 42 orang
 - d. BP Bungus Teluk Kabung berjumlah 43 orang
3. Cabang Pariaman
Terbentuk pada tanggal 28 Februari 2007 dengan 6 kelompok kepentingan yaitu petani, professional, rumah tangga, informal, pemuda mahasiswa dan lansia. Jumlah anggota keseluruhan 353 orang, terdiri dari 7 Balai Perempuan sebagai berikut :
- a. BP Kurai Taji berjumlah 37 orang
 - b. BP Bato Padusunan berjumlah 49 orang
 - c. BP Naras berjumlah 28 orang
 - d. BP Talago Sariak berjumlah 25 orang
 - e. BP Pakasai berjumlah 33 orang
 - f. BP Bungin berjumlah 32 orang
 - g. BP Jati berjumlah 31 orang
4. Cabang Tanah Datar
Terbentuk pada tanggal 28 Februari 2008 dengan 7 kelompok kepentingan yaitu professional, petani, rumah tangga, pemuda mahasiswa, lansia, miskin desa dan masyarakat adat. Jumlah anggota keseluruhan 185 orang , terdiri dari 5 Balai Perempuan sebagai berikut :
- a. BP Kawai berjumlah 12 orang
 - b. BP Alur Tengah berjumlah 30 orang
 - c. BP Patar berjumlah 45 orang
 - d. BP Salimpaung berjumlah 40 orang
 - e. BP Atar berjumlah 33 orang
5. Cabang Pesisir Selatan
Terbentuk pada tanggal 5 April 2008 dengan 5 kelompok kepentingan yaitu professional, petani, rumah tangga, informal dan miskin desa. Jumlah anggota keseluruhan 103 orang, terdiri dari 3 Balai Perempuan sebagai berikut :
- a. BP IV Koto Hilia berjumlah 30 orang
 - b. BP Taluak berjumlah 31 orang
 - c. BP Anakan Sapan berjumlah 30 orang

BAB V

BALAI PEREMPUAN DI PARIAMAN

1. Sejarah Lahirnya Kota Pariaman

Pariaman awalnya adalah Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman.. Pada 29 Oktober 1987 Pariaman resmi menjadi Kota Administratif (Kotif) Pariaman dengan Adlis Legan sebagai Walikota Pariaman pertama. Sejak 2 Juli 2002, Kotif Pariaman berubah menjadi Kota Otonomi yang memiliki pemerintahan sendiri..

Lahirnya Kota otonomi Pariaman adalah bagian dari diimplementasikannya UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak lagi diatur mengenai eksistensi Kotif sebagai wilayah administrasi pemerintahan. Hal ini mengakibatkan munculnya wacana ditengah masyarakat tentang peningkatan status Kotif menjadi Kota Otonom.

Kota Pariaman terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Pariaman Selatan, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Utara. Semua daerah yang berada dalam Kecamatan Pariaman Selatan adalah berbentuk Desa, yang di antaranya adalah Desa Taluak. Sedangkan di Kecamatan Pariaman tengah adalah desa Bato Padusunan yang menjadi lokasi penelitian WEMC. Sedangkan di Kabupaten Padang Pariaman lokasi penelitian difokuskan di Nagari Lareh Nan Panjang.

Secara geografis dan ekonomi, Pariaman terletak sebagian di wilayah pesisir dan sebagian merupakan wilayah agraria. Kondisi dan situasi geografisnya ini mendorong sebagian besar laki-laki di wilayah Pariaman memiliki matapencaharian sebagai nelayan dan petani. Sebagian kecil lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun pedagang. Sementara, para perempuan memiliki matapencaharian sebagai pedagang atau usaha-usaha *home industry* (Lebih detail lihat di desa dan nagari di bawah ini).

2. Peran Koalisi Perempuan dalam Pembentukan Kota Pariaman

Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Padang Pariaman terbentuk ada tanggal....meski demikian jauh sebelum cabang Padang Pariaman terbentuk Koalisi Perempuan Indonesia sudah memiliki anggota yang tersebar di beberapa desa dan nagari. Hal ini sebagai dampak dari model pembentukan struktur Koalisi Perempuan Indonesia yang pada periode pertama menggunakan semangat top down.

Koalisi Perempuan Indonesia sebagai Organisasi Massa mempunyai andil dalam proses pembentukan Kota Administratif Pariaman menjadi Kota Otonom Pariaman yaitu bersama dengan LSM Caredek, Koalisi Perempuan Indonesia ikut bergabung dalam pendirian posko simpatik, yang melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan mengumpulkan tanda tangan masyarakat yang mendukung diresmikannya Kotif Pariaman sebagai kota otonom.

Koalisi Perempuan Indonesia juga melibatkan Forum Pengusaha Perempuan (FP2) untuk melakukan rangkaian kegiatan mendukung Kota Otonom.

3. "Balai Perempuan" Di Desa Taluk

Sengaja istilah "Balai Perempuan" dalam sub ini saya beri tanda petik mengingat sampai hari ini keberadaan "Balai Perempuan" Taluk masih dipandang belum terbentuk secara sah oleh struktur di atasnya dalam hal ini cabang dan wilayah karena proses pembentukannya yang belum memenuhi prosedur pembentukan Balai Perempuan, yaitu tingkat intensitas pertemuan yang masih belum stabil dan pembentukannya yang tidak dihadiri oleh pengurus cabang.

3.1. Profil Desa Taluk

Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan memiliki luas 129,6873 ha terdiri dari tiga dusun yaitu: Dusun Karan, Dusun Taluk dan Dusun Pasar Hilalang. Desa Taluk berbatasan langsung dengan Desa Marabau, timur dengan Desa Marunggi, barat dengan Kelurahan Karan Aur dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Desa Taluk merupakan desa yang cukup strategis karena transportasi dari dan ke Desa Taluk cukup lancar, disamping itu jaraknya ke pusat kota dan pusat pemerintahan juga dekat.

Jumlah penduduk Desa Taluk sebanyak 2.637 jiwa (laki-laki 1.321 dan perempuan 1.316) terdapat 503 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 81 KK perempuan dan sisanya kepala keluarga laki-laki. Sebanyak 211 KK atau 43% dari total 503 KK di Desa Taluk adalah keluarga miskin. Mereka rata-rata berpenghasilan sama atau di bawah Rp 500.000 per bulan (data desa tahun 2009).

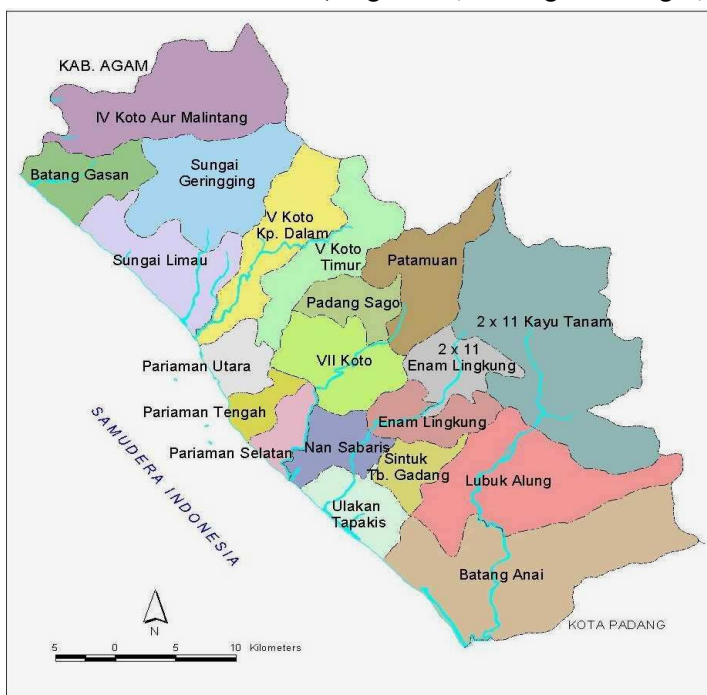
Sebagian besar penduduk laki-laki Desa Taluk adalah nelayan tradisional yang mengandalkan hasil tangkapan dari melaut untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Sementara nelayan perempuan melakukan industri rumah tangga, seperti membuat kerupuk baguak (emping melinjo), merajut atau marendo, membordir dan ada yang bekerja sebagai tukang ojek maupun sebagai buruh harian lepas di rumah makan atau kantin dan di gudang pembuatan ikan teri.

Menurut Yetti Nurfitri sekretaris desa Taluk, salah satu narasumber WEMC, menyatakan bahwa karakteristik masyarakat desa Taluk yang berprofesi sebagai nelayan adalah boros dan kurang hemat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam *talkshow* di Radio Damai Padang Pariaman 25 Februari 2009.

Sejak tahun 1990-an berbagai NGO (*Non Government Organization*) atau Lembaga Swadaya Masyarakat lokal antara lain seperti PIPSP (Pusat informasi

Pengembangan Sumber Daya Pedesaan) dan LP2M (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat) melakukan pendampingan di Desa Taluk.

Sejak tahun 2002 Koalisi Perempuan Indonesia membentuk Balai Perempuan Kurai Taji dengan cakupan Kecamatan Pariaman Selatan dan beberapa orang anggotanya berasal dari Desa Taluk.



Taluk terletak di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman warna pink muda pada peta. Bato terletak di Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman warna ungu muda pada peta. Bungin terletak di Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman warna hijau muda pada peta

Anggota-anggota yang aktif dalam Balai Perempuan tersebut antara lain seperti Yetti Nurfitri dan Ernidawati.

Sejak adanya pendampingan dan keterlibatan dalam Balai perempuan, masyarakat Desa Taluk menjadi lebih terbuka dan peduli terhadap pentingnya program pembangunan. Disamping itu, akses masyarakat Desa Taluk terhadap informasi cukup baik, karena lokasi desa yang dekat pusat pemerintah atau pusat kota.. Meskipun sebagian besar program di Desa Taluk hanya dinikmati oleh kaum laki-laki maupun orang-orang yang berada dalam lingkaran pemerintah desa, namun, keberadaan pemimpin perempuan yang mampu menggerakkan perempuan lain di Desa Taluk mempercepat proses penerimaan program, sehingga bermanfaat bagi kemajuan perempuan. Hal yang sama tidak ditemukan di dua desa lain yang menjadi lokasi penelitian program WEMC.

Faktor geografis, pendampingan dari berbagai NGO atau LSM, akses ke pusat pemerintahan dan keberadaan pemimpin perempuan menentukan keberhasilan program pemberdayaan perempuan.

3.2. Pembentukan Koperasi Buluh Perindu di Desa Taluk

Setidaknya ada beberapa organisasi dan program yang melibatkan perempuan di Desa Taluk yang didorong atau dibentuk oleh pemerintah yaitu organisasi PKK, Kredit Mikro, Simpan Pinjam Perempuan program PNPM, Posyandu, Jamkesmas, program pelatihan paket A, B dan C. Sedangkan Organisasi Rendo, kelompok Baguak, kelompok Ojek Perempuan, kelompok Yasinan merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. (disarikan dalam FGD di Taluk tanggal 9 November 2008).

Sejak tahun 1990-an Organisasi Non Pemerintah PIPSP (Pusat informasi Pengembangan Sumber Daya Pedesaan) menyelenggarakan program *income generating* yang bernama Kelompok UBSP (Usaha Bersama Simpan Pinjam) dan program sanitasi di desa Taluk. Kelompok UBSP akhirnya bubar pada tahun 1995. Mantan anggota PIPSP kemudian aktif menyelenggarakan Usaha Simpan Pinjam di dalam struktur desa/nagari.

Diinisiasi oleh beberapa perempuan di desa Taluk yang sejak dua tahun terakhir (2007-2008) aktif dalam kegiatan WEMC (Women Empowerment in Muslim Context's) bekerjasama dengan Koalisi Perempuan Indonesia didirikan Kelompok pada 24 November 2008. Mereka yang menginisiasi kelompok ini merupakan narasumber WEMC yang berinteraksi secara intens dengan tim peneliti.

WEMC melakukan program penelitian pemberdayaan perempuan di desa tersebut dalam kerangka mendokumentasikan berbagai inisiatif yang dilakukan oleh perempuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Pendirian kelompok ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memiliki wadah bagi para perempuan untuk berjuang secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka di masa mendatang dan demi terwujudnya keadilan dan kesetaraan bagi perempuan khususnya dan masyarakat Desa Taluk pada umumnya. Hal ini telah dirumuskan bersama dalam visi misi organisasi mereka. Mereka berpendapat bahwa berjuang secara bersama akan lebih memudahkan langkah mereka untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Ke depan mereka berkehendak menjadikan kelompok sebagai koperasi yang kuat dan menjadi pusat kegiatan bagi ibu-ibu, baik sebagai pusat ekonomi maupun sebagai pusat pendidikan bagi perempuan maupun sebagai pembelajaran bersama bagi mereka untuk mendapatkan berbagai macam pengetahuan, yang mereka rasakan sangat berguna bagi kehidupan mereka, seperti persoalan-persoalan pendidikan, kesehatan, akses-akses ekonomi dan berbagai pengetahuan lainnya. Koperasi tersebut diberi nama Koperasi Buluh Perindu.

Pengalaman Yetti Nurfitri mengurus UBSP dan mengikuti berbagai pelatihan seperti pelatihan Usaha Ekonomi Desa (UED) tahun 1989, Pelatihan Pembukuan bagi kelompok wanita binaan PIPSP tahun 1991, Pelatihan Partisipatif Pembangunan, Masyarakat Desa (P3MD) oleh

Dari FGD yang dilakukan didapat bahwa isu prioritas adalah akses perempuan terhadap sumber ekonomi. Dari penemuan isu prioritas bagi perempuan di Taluk inilah langkah awal gerakan kolektif bagi perempuan di Taluk dimulai lagi. Dari hasil diskusi yang intensif akhirnya disepakati untuk mendirikan Koperasi Perempuan di Taluk yang diberinama **Koperasi Buluh Perindu.**

Pemda Kota Pariaman tahun 1998, Pelatihan Kesehatan mata dasar bagi tenaga kader Puskesmas se Kabupaten/Kota Pariaman tahun 2003 meningkatkan kapasitasnya sebagai pemimpin. Ia pun menjadi motivator pada berbagai kegiatan organisasi perempuan hingga akhirnya ia dapat menduduki jabatan sebagai sekretaris desa sampai sekarang dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2009.

Keberdayaan Yetti Nurfitri berpengaruh positif kepada perempuan lain di desa Taluk. Mereka termotivasi untuk belajar mengambil hikmah dan mencontoh tindakan, sikap dan ingin memiliki wawasan seperti Yetti Nurfitri juga.

Kegigihan dan pengalaman yang dimiliki Uni Yet itulah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk melibatkannya dalam proses pengorganisasian pada fase penelitian aksi WEMC tahun 2007 sampai 2008 awal di desa Taluk. Pada masa itulah keterlibatan mendalam dengan KPI mulai lagi dirasakan dengan adanya program penelitian aksi WEMC –KPI. Pada tanggal 12 Agustus 2009 ketika dilakukan Focus Group Discussion yang difasilitasi oleh WEMC-KPI, Yetti Nurfitri mengajak perempuan di Taluk untuk hadir dalam FGD tersebut. Penggalan isu prioritas perempuan di desa Taluk dilakukan. Dari hasil penelitian dan wawancara didapat 5 isu:

1. Akses perempuan terhadap hak kepemilikan tanah
2. Akses perempuan terhadap pendidikan
3. Akses perempuan terhadap kesehatan
4. Akses perempuan terhadap sumber ekonomi.
5. Akses perempuan di ruang public.

Untuk aksi yang lebih fokus, dari kelima isu tersebut dipilih isu prioritas bagi perempuan Taluk. Dari FGD yang dilakukan didapat bahwa isu prioritas adalah akses perempuan terhadap sumber ekonomi. Dari penemuan isu prioritas bagi perempuan di Taluk inilah langkah awal gerakan kolektif bagi perempuan di Taluk dimulai lagi. Dari hasil diskusi yang intensif akhirnya disepakati untuk mendirikan Koperasi Perempuan di Taluk yang diberinama **Koperasi Buluh Perindu.**

Dibentuknya Koperasi Buluh Perindu pada tanggal 24 November 2008 sebagai bentuk aksi dalam menjawab persoalan ekonomi perempuan di Taluk yang meliputi modal dan pemasaran untuk usaha rajutan atau rendo, membuat keripik dari emping melinjo dan usaha warungan. Dengan terbentuknya Koperasi yang sekarang sudah mempunyai AD/ART maka harapan anggota ke depan Koperasi ini juga dapat mengakses dana-dana dari pemerintah untuk pengembangan usaha-usaha lainnya bagi perempuan.

Koperasi Buluh Perindu merupakan dampak positif dari adanya program WEMC yang telah tiga tahun lebih memberikan penguatan sehingga perempuan yang bergabung menjadi anggota koperasi, memperkenalkan organisasi ini pada masyarakat dengan mengundang

pemerintah dan juga kawan-kawan anggota Tim WEMC dari Jakarta (perbincangan tanggal 10 Januari 2009).

Pertumbuhan kelompok perempuan di Taluk ini cukup progresif, terbukti dengan penambahan anggota koperasi dari 25 orang menjadi 35 orang dan penambahan modal koperasi yang kini mencapai Rp.2.080.000 dan digulirkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota. Bukti lain adalah jumlah kehadiran anggota dalam setiap diskusi Tematik selalu melebihi 20 orang anggota.

Jumlah anggota Koperasi ini sudah melebihi syarat minimal terbentuknya suatu Balai Perempuan di desa Taluk. Dalam tahap diskusi selanjutnya, kelompok ini bersepakat untuk membentuk Balai Perempuan sendiri di desa Taluk. Namun karena pembentukan tersebut tidak dihadiri oleh Sekretaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia cabang Pariaman, yang bertanggung jawab untuk memverifikasi kelayakan jumlah dan keaktifan Balai Perempuan keberadaan Balai Perempuan Taluk belum dapat diakui. Meski demikian, mereka tetap berkegiatan dalam wadah Koperasi Buluh Perindu dan tetap merasa sebagai anggota Koalisi Perempuan Indonesia.

Persoalan terkait struktur organisasi diatas ternyata tidak membuat perempuan yang sebagian besar adalah anggota Koalisi Perempuan Indonesia ini berhenti aktivitasnya, mereka tetap berinisiatif melakukan pemberdayaan ekonomi dan tetap merasa sebagai bagian dari Koalisi Perempuan Indonesia melalui Koperasi Buluh Perindu.

Verifikasi Balai Perempuan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi tumpang tindih antara struktur dan aktifitas Balai perempuan dengan Koperasi. Balai perempuan adalah struktur kesekretariatan Koalisi Perempuan Indonesia di tingkat basis untuk menggalang anggota melalui berbagai agenda gerakan. Sedangkan Koperasi, merupakan organ taktis yang dibangun dalam Balai Perempuan untuk memenuhi kebutuhan anggota Koalisi Perempuan Indonesia dalam Balai Perempuan. Organ taktis lainnya yang dapat dibentuk dalam Balai perempuan adalah Kelompok Belajar, kelompok produksi, dan support group untuk mengatasi berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh anggota.

3.3. Aktivitas “Balai Perempuan” dalam situasi dan waktu

Inisiatif perempuan di Desa Taluk untuk bisa mengakses ekonomi dan berpartisipasi di ruang publik sudah tumbuh. Pada tahun ketiga penelitian ini sudah mulai mengkristal dimana setiap orang yang menjadi anggota mulai berani menyuarakan pendapat serta melakukan advokasi atas persoalan yang menjadi faktor pelemah.

Dalam pertemuan kelompok pada 31 Januari 2009 muncul inisiatif Yetti Nurfitri untuk berdialog dengan Kepala Desa, dengan tujuan mensosialisasikan kelompok dan menyampaikan keinginan kelompok untuk bisa ikut dan berpartisipasi dalam musrenbang desa, karena musrenbang desa akan segera dilaksanakan.

Dialog dengan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2009. Mereka menyampaikan secara tertulis Profil Kelompok Koperasi Buluh Perindu yang memuat antara lain tujuan yang ingin dicapai melalui kelompok serta rencana kerja ke depan. Disampaikan keinginan mereka untuk bisa berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang desa) yang akan dilakukan pada tanggal 18 Februari 2009. Kepala Desa mengakomodir keinginan tersebut sekaligus menyarankan agar kelompok ini segera didaftarkan ke Dinas Koperasi, sehingga nantinya Koperasi Buluh Perindu sebagai salah satu kelompok yang berhak mendapatkan dana pembinaan dari pemerintah

Salah satu strategi mendorong percepatan agar semua anggota mampu menyuarakan kepentingannya adalah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas melalui diskusi tematik secara berkesinambungan dengan mengangkat berbagai tema/isu penting yang diusulkan anggota pada pertemuan sebelumnya, antara lain adalah :

- a. Diskusi tentang 'Fikih Perempuan Haid dan Islam' yang dilaksanakan di Kantor Desa Teluk, 14 Agustus 2009, dihadiri 28 perempuan.. Tema dipilih mengingat selama ini tafsir ajaran Islam yang disampaikan pada perempuan kebanyakan merugikan dan tidak memihak, misalnya saja terkait adanya tafsir yang menyatakan perempuan menstruasi tidak dapat memasuki masjid. Diskusi tersebut dilakukan untuk kaji ulang terhadap pemahaman tentang haid yang dipandang kotor dan kesempatan bagi perempuan haid untuk melakukan ibadah.
- b. Diskusi dengan tema "PerKoperasian" pada 4 November 2009, bertempat di kediaman Uni Yet (Yetty Nurfitri) dihadiri 12 orang.²² Diskusi ini dilakukan untuk memahami dasar-dasar perkoperasian dan mencegah terulangnya kegagalan dalam mengelola koperasi. Hal ini dilakukan mengingat perempuan desa Taluk bersepakat untuk dapat berdaya secara ekonomi dan ingin mencegah terjadinya kegagalan dalam mengelola koperasi. Diskusi ini diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Akhir Tahun Koperasi dengan mengundang pemerintah desa dan instansi terkait untuk ikut mendengarkan laporan mereka sebagai pertanggungjawaban organisasi. Inisiatif ini muncul mengingat



Dialog dengan kepala desa Taluk, 21 November 2009

laporan akhir tahun merupakan tindakan preventif perempuan terulangnya kegagalan dalam membangun koperasi

- c. Selain kegiatan yang difokuskan pada isu utama yang dipilih, anggota di Taluk juga mendapat penguatan dalam kemampuan tanggap bencana. Kegiatan yang bertema "Peranan Perempuan dalam Situasi tanggap Darurat" dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Desember atas kerjasama dengan dengan Solidaritas Perempuan dalam kegiatan Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Perempuan di Taluk juga secara rutin melakukan rapat organisasi untuk berbagi informasi terkait perkembangan kegiatan sekaligus melakukan pelaporan pengurus. Dengan model seperti ini, maka setiap anggota dapat mengetahui perkembangan dan terlibat dalam perumusan strategi untuk menjawab berbagai kendala yang ada.

²² Lihat fieldnote Juni Warlif 4 November 2009

Untuk respon tanggap darurat pasca gempa Sumatera Barat, tim peneliti WEMC baik yang ada di Sumatera Barat maupun yang tersebar di daerah dan negara lain saling membantu melakukan berbagai aktifitas yaitu²³ :

a. Persiapan :

Internal Koalisi Perempuan Indonesia, mengadakan rapat darurat setelah dapat berkontak dengan pengurus wilayah dan peneliti di Sumbar. Melakukan need assessment , lalu melakukan penggalangan dukungan bantuan untuk korban gempa kepada masyarakat luas.

Peneliti (Juni Warlif) bekerjasama AMURT mengelola bantuan untuk korban gempa, hal ini dilakukan agar proses tanggap darurat dapat maksimal dilakukan.

b. Pelaksanaan :

Setelah bantuan terkumpul, koordinator turun langsung ke lokasi dan secara bersama-sama dengan sekretariat wilayah melakukan :

- Menyusun mekanisme distribusi bantuan
- Bersama-sama membaca ulang data korban dan titik kritis dimana anggota Koalisi Perempuan Indonesia menjadi korban
- Turun langsung ke titik kritis dan bertemu dengan para penggerak komunitas di Balai Perempuan maupun Fokal Point
- Mendistribusikan bantuan
- Menjalin kerjasama dengan Gerakan Kemanusiaan Indonesia untuk penanganan medis
- Menjalin kerjasama dengan WALHI untuk bantuan tenda
- Menjalin kerjasama dengan AMURT untuk distribusi logistik (utamanya titik dimana banyak terdapat narasumber WEMC).

c. Pasca :

Melakukan pelaporan kegiatan tanggap darurat bencana yang disebarakan melalui milis-milis sebagai informasi penerimaan dan distribusi bantuan ke publik.

Pada Desember 2009 , dilakukan kerjasama antara peneliti WEMC dengan Solidaritas perempuan untuk melakukan penguatan kepada Kelompok perempuan di Taluk dan Bato juga 2 wilayah lain seperti Palak Aneh dan Pakasai tentang Tema Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dalam situasi Krisis atau bencana. Diskusi ini dimaksudkan selain untuk capacity Building juga sebagai strategi dalam mendekati kelompok dengan berbagai jaringan untuk dapat bekerjasama dalam rangka penguatan kelompok ke depan.

3.4. Dampak “Balai Perempuan” Koperasi Buluh Perindu Bagi Anggota

Keterlibatan perempuan di Desa Taluk di “Balai Perempuan” Koperasi Buluh Perindu dirasakan membawa dampak positif. Hal ini terungkap dari berbagai pernyataan narasumber. Saling mengajak antar perempuan untuk aktif dalam pertemuan-pertemuan maupun menjadi anggota Koperasi merupakan strategi pemberdayaan yang akhirnya berdampak positif antara lain meningkatkan kesadaran perempuan untuk terlibat aktif pada urusan publik, meningkatkan kepercayaan diri perempuan dalam mengemukakan pendapat dan bernegosiasi dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan baik di ruang publik maupun dalam rumah tangga.²⁴

3.5. Dampak “Balai Perempuan” Koperasi Buluh Perindu bagi perempuan

a. Secara Individu



²³ Terangkum dalam fieldnote Juni Warlif Oktober 2009

²⁴ Lihat wawancara Yuni Alif pada 3 dan 13 Desember 2008

Pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Koperasi Buluh Perindu memberikan ruang bagi tiap individu untuk berbagi pengalaman sebagai media untuk belajar bersama dan mengurangi beban psikologis anggotanya. Dengan berbagi pengalaman antar perempuan, anggota-anggota Koperasi Buluh Perindu merasakan bahwa mereka saling mendukung sesama perempuan dan tidak sendirian menghadapi beban hidupnya. Dengan berbagi pengalaman sesama perempuan, anggota Koperasi Buluh Perindu juga dapat belajar dan memperoleh inspirasi untuk menyelesaikan masalahnya.

Dengan diskusi rutin dan berbagi pengalaman, perempuan juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan inisiatifnya sebagai individu, misalnya memberikan kesempatan bagi tiap individu untuk mengusulkan tema diskusi, narasumber dan berbagi peran dalam diskusi.

Penuturan perjuangan hidup masing-masing anggota, memberikan motivasi bagi tiap individu untuk berjuang menghadapi berbagai beban dan tantangan kehidupan. Disamping itu, penuturan kisah hidup setiap individu, menyadarkan pada anggota koperasi, bahwa ada persoalan kekerasan terhadap anak yang cukup serius di lingkungan mereka. Seperti kisah Nurjasmi, yang bekerja sebagai tukang ojek, *marendo*, bekerja di kantin sekolah dan warung makanan untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Semasa kecil, Nurjasmi mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh ibu kandungnya yaitu dibuang ke sumur ketika berusia 8 bulan oleh ibunya. Beruntung ia kemudian diselamatkan oleh tukang bangunan dan diletakkan di pinggir jalan. Namun perjalanan hidupnya itu tidak pernah membuatnya dendam pada ibunya, karena ia selalu menumbuhkan pikiran positif. Sepanjang hidupnya, Nurjasmi tidak pernah mengecap bangku sekolah sehingga dia tidak bisa membaca dan menulis. (*Disarikan dari Fieldnote Juni Warlif, 14 Agustus 2008*)

Tradisi kawin atas paksaan orang tua juga merupakan persoalan yang dialami oleh anak perempuan di desa Taluk. Namun anak-anak perempuan memiliki strateginya sendiri untuk melawan tradisi tersebut. Amoy, anggota Koperasi mengisahkan bahwa setelah tamat SMA tahun 1989 dirinya langsung merantau ke Jakarta karena dia tidak mau dikawinkan. Ia kemudian bekerja di Jakarta sebagai karyawan swasta, hingga kemudian dia menikah dengan laki-laki pilihannya. Sekitar tahun 2002, Amoy pulang ke Taluk dan aktif di kegiatan-kegiatan sosial yang ada dan menjadi kader serta mengurus kelompok-kelompok atau organisasi yang ada di Taluk (*disarikan dari fieldnote Juni Warlif, 19 Agustus 2008*).

Yetti Nurfitri menggunakan strategi dengan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di desa, sebagai kader berbagai kegiatan, walaupun dia tidak memperoleh imbalan dari kegiatannya. Namun dia selalu memotivasi dirinya. Dia juga menjadikan pesan Anduangnya sebagai penguat bersemangat, karena Sang Anduang pernah mengatakan bahwa nanti dengan bekal sekolah yang dia berikan, Yetti Nurfitri akan bisa membantu masyarakat.

b. Secara Kolektif

Sebagai alat perjuangan bersama, perempuan di Taluk mendirikan Kelompok Koperasi Buluh Perindu yang merupakan inisiatif mereka bersama untuk mengatasi persoalan ekonomi dihadapi dengan tujuan untuk membantu anggota dalam hal permodalan, kemampuan mengakses dana dari pemerintah, bank dan LSM (*disarikan dari fieldnote Juni Warlif, 24 November 2008*).

Kelompok Buluh Perindu melakukan pertemuan rutin setiap bulan pada tanggal 10. Untuk membahas tema-tema berkaitan dengan kebutuhan mereka dan memanfaatkannya sebagai ruang untuk kesadaran kritis agar bisa lebih bijaksana menilai dan memahami program-program atau kebijakan-kebijakan.

Selain Koperasi Buluh Perindu, ada kelompok Yasinan yang diselenggarakan secara rutin sebagai media mempererat hubungan antar perempuan dan untuk mengkaji ulang berbagai tafsiran ajaran agama.

3.6. Dampak “Balai Perempuan” Koperasi Buluh Perindu bagi Desa Taluk

Aktivitas perempuan di Desa Taluk yang secara rutin dilakukan, mendapat respon yang beragam dari pemangku kepentingan setempat. Jika di awal, banyak yang meragukan aktivitas pemberdayaan perempuan ini akan terus hidup, namun setelah melihat aktivitas yang dilakukan, maka di tahun 2008, pemangku kepentingan di desa Taluk sudah sangat terbuka dan menjadikan Koperasi Buluh Perindu sebagai mitra kerjanya.

Kepala Desa memberikan kepercayaan dan meminta dana simpan pinjam usaha desa untuk dikelola oleh Koperasi Buluh Perindu. Keterbukaan tersebut, disebabkan beberapa faktor misalnya Perempuan di Desa Taluk berhasil mendesak agar kegiatan bersama antar anggota Balai Perempuan dan warga masyarakat sekitar lainnya. Desakkan tersebut direspon dengan diselenggarakannya ajang solidaritas antar warga, dan menumbuhkan kerjasama yang baik antara Peneliti WEMC- Pemerintah tingkat Kecamatan- Pemerintah Nagari- Pemerintah Desa - serta masyarakat setempat (masyarakat korong Bungin, masyarakat desa Bato dan masyarakat desa Taluk) bertepatan dengan hari kemerdekaan RI. Momen seperti ini diharapkan ‘dapat menularkan’ pemahaman, pengetahuan dan kesadaran baru dalam masyarakat mengenai kesetaraan, kebersamaan, persamaan, saling menghormati dan menghargai diantara warga masyarakat.

4 Balai Perempuan di Desa Bato Padusunan

4.1 Profil Desa Bato

Desa Bato adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pariaman Tengah dengan luas 75 ha. Topografi daerahnya beragam, mulai dataran tinggi, pebukitan dan daerah yang bergelombang. Berbatasan langsung dengan Desa Talago Sariak di sebelah timur, berbatasan dengan Desa Nareh di sebelah barat, dengan Desa Santok di sebelah utara dan dengan Desa Jati di sebelah selatan. Transportasi dari dan ke desa ini cukup lancar, juga dekat ke pusat kota dan pusat pemerintahan, yang bisa di tempuh dengan waktu lebih kurang 15 menit.

Disarikan dari buku Potensi Desa tahun 2006, diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Bato adalah 776 jiwa yang terdiri dari (laki-laki 386 jiwa dan perempuan 390 jiwa). Satu orang diantaranya adalah tunarungu dan 2 orang tunanetra. Kepala keluarga (KK) di desa ini adalah 176 dan jumlah kepala keluarga perempuan adalah 77 orang.

Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Rata-rata mereka memiliki lahan sendiri sebagai tempat berusaha tani dan yang lainnya sebagai petani penggarap atau buruh tani. Pekerjaan lainnya adalah sebagai pegawai swasta, PNS, pedagang, peternak, montir dan pekerja industri rumah tangga (membordir) yang biasanya digeluti oleh kaum perempuan. Ada juga masyarakat yang bekerja serabutan (tidak tetap).

Komoditi utama daerah ini adalah padi dengan rata-rata luas lahan garapan 58 ha setiap musim tanam. Di samping itu masyarakat juga membudidayakan tanaman perkebunan seperti coklat (cacao), kelapa dan lain sebagainya. Namun kondisi di atas belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan karena kepemilikan lahan mereka kurang dari 0,5 ha dan bahkan ada yang kurang dari itu, sehingga hasilnya tidak mencukupi kebutuhan keluarga.

Semenjak tahun 1990-an sebagai alternatif penunjang ekonomi keluarga banyak bermunculan usaha-usaha industri rumah tangga yang dilakukan oleh kaum perempuan seperti usaha bordir. Keterampilan itu mereka dapatkan melalui pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh pemerintah maupun dari organisasi non pemerintahan.

Masyarakat Desa Bato hampir keseluruhannya menganut paham muhammadiyah, sehingga adanya keberadaan Aisyiyah dalam tingkat Desa. Kuatnya pengaruh Muhammadiyah ini, dapat dilihat dari keberadaan sebuah TK Aisyiyah. Desa Bato adalah satu dari sedikit daerah yang banyak penganut Muhammadiyah, dan di Tingkat Desa ada organisasi Aisyiyah. Tidak banyak daerah di pariaman yang kuat pengaruh Muhammadiyahnya karena basic Pariaman

terkenal dengan sejarah Islam suluk dan bahkan suluk ini masih dapat ditemui di beberapa daerah. Muhammadiyah sebagai paham keislaman era awal 90an bendapatkan tempat di masyarakat Desa Bato, dan tradisi Islam Muhammadiyah dapat dilihat di masyarakat Bato, seperti pada acara kematian.

Sama dengan beberapa daerah lainnya, di Desa Bato terdapat sebuah SD yang mana siswanya menggunakan jilbab. Berbeda dengan Desa Taluak, di Desa bato, siswa diwajibkan memakai jilbab baru dua tahun belakangan, jadi lebih telat dibandingkan dengan beberapa sekolah di Desa Taluak yang menggunakan jilbab untuk siswa SD sudah berlangsung selama lima tahun.

Di Desa Bato hampir rata-rata perempuan melakukan kegiatan home industry berupa pembuatan Mukenah. Dengan Keterlibatan perempuan di sektor ekonomi, akan dilihat apakah perempuan tersebut memiliki kekuatan dalam menghadapi pelemahan terhadapnya dan melihat kegiatan home industry sebagai sebuah langkah pemberdayaan di bidang ekonomi perempuan.²⁵

Untuk penunjang usaha industri rumah tangga ini di Desa Bato ada beberapa lembaga ekonomi masyarakat seperti UED-SP (Usaha Ekonomi Desa- Simpan Pinjam) dengan jumlah anggota 47 orang dan juga kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Keluarga) dengan anggota 10 orang. Selain itu ada Simpan Pinjam Bundo Kandung dan pada dua tahun terakhir kegiatan PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perkotaan) telah dilaksanakan.

Di samping itu juga ada organisasi kemasyarakatan lainnya yang aktif dan berkiprah di tengah masyarakat, seperti Koalisi Perempuan Indonesia dengan jumlah anggota 20 orang, organisasi pemuda/karang taruna dengan jumlah anggota 63, kelompok wanita tani (KWT) yang merupakan organisasi profesi yang beranggotakan 35, dan satu Lembaga Pemasarakatn Desa (LPM) dengan jumlah pengurus 15 orang.

Khusus untuk Simpan Pinjam Bundo Kandung yang dibentuk karena ada dana *Life Skill* pada tahun 2002, sebagian besar anggota simpan pinjam tersebut adalah anggota Balai Perempuan.

4.2 Pembentukan Balai Perempuan di Desa Bato

Di Bato, hampir sama dengan Taluk. Beberapa organisasi sudah dijalani oleh perempuan sebelumnya. Sebut saja, Aisyiah, PKK, Kelompok Simpan Pinjam Perempuan dari PNPM, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Senam Lansia, maupun Kader Posyandu. Kelompok lain yang berasal dari masyarakat adalah kelompok Yasinan.

Balai Perempuan Bato Padusunan berjumlah 49 orang. Pengalaman berorganisasi dari sebagian anggotanya bukanlah fenomena baru. Banyaknya organisasi di desa membuka kesempatan bagi beberapa perempuan untuk menjadi anggota lebih dari satu organisasi. Sisi positif dari keterlibatan pada lebih dari satu organisasi adalah perempuan memiliki lebih banyak peluang untuk belajar dan memperoleh lebih banyak pengalaman. Namun sisi negatif dari keterlibatan pada lebih dari satu organisasi adalah sulitnya berkoordinasi dan menyepakati satu tanggal untuk pertemuan.

Berbeda dengan di Taluk dan Bungin, di Bato perjalanan kelompok terkesan sedikit lamban, karena pengurus Balai Perempuan yang telah dipilih pada tahun 2002 banyak yang tidak aktif bahkan ada yang mengundurkan diri. Dalam perbincangan dan dalam beberapa kali diskusi dengan para narasumber dan perempuan lainnya di Desa Bato, terungkap keinginan mereka untuk mengaktifkan kembali kelompok Balai Perempuan dan menyusun kembali kepengurusannya, dalam rapat kelompok pada tanggal 06 Maret 2009.

Persoalan-persoalan yang mereka hadapi kurang lebih sama dengan perempuan di Desa Taluk dan Bungin, yaitu persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, perempuan dan politik serta persoalan hak ulayat. Namun, setelah mereka berdiskusi pada tanggal 07 November

²⁵ Catatan peneliti lapangan

2008 disepakati bahwa prioritas utama mereka adalah persoalan kesehatan. Hal itu diperkuat dalam diskusi gabungan tiga desa yang diadakan di Taluk pada tanggal 24 November 2008.

Untuk menyikapi persoalan kesehatan yang mereka alami. Salah satu langkah konkritnya mereka melakukan diskusi tentang kesehatan reproduksi pada tanggal 21 Juni 2009 dengan narasumber dari PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Sumatera Barat. Kegiatan ini dilanjutkan dengan melakukan diskusi dan dialog mengenai Jamkesmas dengan Puskesmas Air Santok pada tanggal 08 Agustus 2009.

Diskusi Jamkesmas di Kantor Desa Bato tanggal 10 Agustus 2009, dihadiri oleh 25 orang peserta dan kepala Desa Bato, dibantu oleh 2 orang narasumber (Krisna Desria dan Delri Sony, staf Puskesmas Santok).

Diskusi yang terjadi antara peserta dan fasilitator cukup hidup, pemaparan yang disampaikan oleh pembicara ditanggapi oleh peserta dan terjadi diskusi yang cukup hangat. Poin-poin diskusi adalah sbb:

- o Ada informasi bahwa: Kota Pariaman memiliki program Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), untuk menjangkau 7000 orang penduduk miskin untuk wilayah kerja Puskesmas Santok termasuk desa Bato, namun yang baru terealisasi hanya 433 kartu; Tahun 2010 akan ada pelayanan kesehatan gratis, namun masih menunggu informasi selanjutnya;
- o Keluhan peserta terhadap buruknya pelayanan puskesmas ditanggapi positif oleh pemapar yang juga staf Puskesmas Santok, ia berjanji bahwa staf Puskesmas akan lebih baik dalam bekerja, memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga tanpa memandang bulu;
- o Pertanyaan peserta mengenai hanya sedikit warga desa Bato yang mendapatkan manfaat dari Jamkesmas sedangkan yang membutuhkan lebih banyak lagi ditanggapi oleh kepala Desa Bato, bahwa pendataan siapa yang dapat dan tidak mengakses fasilitas Jamkesmas dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kantor Statistik Kota Pariaman, aparat desa sama sekali tidak dilibatkan dan tidak bisa berbuat apa-apa jika ada warga yang complain merasa haknya tidak dipenuhi.
- o Diakhir sesi peserta menyusun RTL (Rencana Tindak Lanjut), yaitu: peserta akan menyampaikan informasi penting hasil diskusi kepada rekan-rekan lainnya yang tidak sempat hadir dalam diskusi.

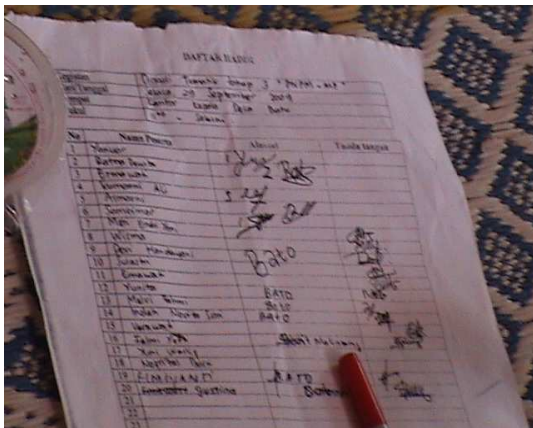


Foto 3: Daftar hadir BP Bato



Foto 4:BP Bato Mengikuti diskusi tematik

4.3 Aktivitas Balai dalam situasi dan waktu

Perempuan di Bato hanya kenal dengan KPI (Koalisi Perempuan Indonesia), jarang yang tahu dengan Balai Perempuan seperti yang dikatakan oleh Erayani. Dia diajak oleh Sumarni Ali untuk ikut, namun dia tidak tahu banyak dengan KPI. Dia cuma tahu bahwa KPI

sangat menolak ada kekerasan dalam rumah tangga karena itu yang selalu disampaikan oleh Sumarni Ali. Menurutnya kegiatan KPI hanyalah berkumpul-kumpul saja. Akhirnya dia jarang aktif. Apalagi KPI kegiatannya hampir tidak ada, kadang-kadang 6 bulan baru ada kegiatan lagi. Barulah sejak program WEMC dilaksanakan di Bato, KPI mulai melakukan kegiatan. Menurut Erayani kegiatan KPI hampir sama dengan diskusi-diskusi Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan.

Balai Perempuan Bato, melakukan berbagai kegiatan, seperti diskusi kelompok dan menyelenggarakan usaha ekonomi yaitu simpan pinjam kelompok. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) “ Perempuan Dan Kesehatan “Kegiatan FGD Ini Di Laksanakan Di Bato Pada 25 September 2007 membahas berbagai persoalan kesehatan yang dihadapi perempuan, terutama Keluarga Berencana. Dalam Diskusi ini sesama perempuan bertukar pengalaman tentang pandangan mereka pada KB. Dalam prosesnya, beberapa anggota diskusi yang memiliki pandangan negatif terhadap program KB, seperti menganggap bahwa KB bertentangan dengan Islam, mengalami perubahan. Beberapa anggota yang dihadapkan masalah pada larangan suami untuk mengikuti KB juga mendapatkan inspirasi tentang cara menghadapi sikap suami mereka masing-masing²⁶.

Sedangkan FGD tentang “ Perempuan Dan Dunia Publik “ pada 26 November 2007 Bertempat Di Masjid Ad-Dhuha Desa Bato membahas tentang mengapa perempuan penting untuk aktif di ruang public, apa kendalanya dan bagaimana menghadapi berbagai kendala beraktifitas di ruang public.²⁷

FGD Menyangkut Masalah Hak-Hak Atas Tanah Pusaka, dilaksanakan , 13 Desember 2007 di Rumah Sumarni Ali. Diskusi ini membahas rencana penjualan Hak Atas Tanah Pusaka Paman dari Ibu Sumarni, namun ditolak oleh anggota keluarga perempuan, yang disebut Bundo Kandung. Bagi bundo Kandung Harta Pusaka itu Ibaratnya “ Di Beli Dengan Tembiling Besi Dan Bukan Dengan Tembiling Emas “ Maksudnya Harta Pusaka itu tidak bisa di beli dengan uang. Karena untuk mendapatkan Harta Pusaka dengan kerja keras dengan jalan Menaruko. Sementara emas dalam Adat dan Budaya Minang dapat dibeli dengan Uang. Cara Mendapatkan Tanah Pusaka itu oleh kaum Dahulunya adalah dengan cara di Taruko (Land Clearing dengan cara manual menggunakan cangkul, parang dan sejenisnya), Kemudian berapa yang sudah selesai di Taruko di Klaim atau di Justifikasi secara bersama sebagai Harta Kaum Atau Harta Pusaka.²⁸

Kelompok Simpan Pinjam Bundo Kandung merupakan kelompok lain yang ada di masyarakat dan menjadi lembaga ekonomi mikro di tengah masyarakat. Sayangnya organisasi ini juga menjadi pro dan kontra diantara mereka. Sebagian mereka mengatakan bahwa Bundo Kandung ini terbentuk melalui kegiatan KPI seperti yang di ungkapkan oleh Opet salah seorang Informan “*Bundo Kandung itu dari Koalisi Perempuan Indonesia yang membentuknya*” (pertemuan kelompok, 25 Desember 2008). Namun banyak anggota yang tidak tahu sejarah berdirinya organisasi ini, seperti ungkapan Erayani “*Orang tidak tahu apakah itu Koalisi Perempuan Indonesia atau apa, yang dia tahunya ini adalah Bundo Kandung, dan dia tidak tahu kalau Koalisi Perempuan Indonesia dari Bundo Kandung*” (pertemuan kelompok, 25 Desember 2008). Hal senada juga diungkapkan oleh Desi yang menjadi ketua organisasi Bundo Kandung itu “*..... Bundo kandung tidak ada dihubung-hubungkan dengan KPI ini,*” Lebih lanjut dia mengatakan “*sudah diujung-ujung Esi tahu kalau kegiatan Bundo Kandung ini program KPI. Esi pikir Bundo Kandung ini bukannya program pendidikan. Dari awal-awal Esi tahunya ini program dari Dinas Pendidikan, program life skill* “ (wawancara dengan Desi Novita, 06 Maret 2009).

²⁶ Laporan FGD , 27 September 2007

²⁷ Laporan FGD , 26 November 2007

²⁸ Laporan FGD, 13 desember 2007

Menurut anggota Balai Perempuan yang juga menjadi anggota Bundo Kanduang, sekarang Bundo Kanduang menghadapi banyak masalah karena kurangnya keterbukaan dari pengurus. Laporan kegiatan dan laporan keuangan tidak jelas. (*Pertemuan kelompok, 25 Desember 2008*)

Kritik lain yang disampaikan oleh sesama anggota adalah, bahwa selama ini Koalisi Perempuan Indonesia dipandang dan dikenal sebagai organisasi yang sangat menentang kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun beberapa anggota menganggap bahwa perlawanan terhadap KDRT masih ditingkat wacana. Dia mencontohkan, meskipun Koalisi Perempuan Indonesia sangat menentang kekerasan dalam rumah tangga, namun masih ada anggota maupun pengurus Koalisi Perempuan Indonesia yang sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan belum cukup terbuka untuk membahas pengalamannya dalam Balai Perempuan. Mereka tidak pernah jujur mengatakannya, selalu beralasan bahwa bengkok dan lebam yang ada di wajahnya karena dia jatuh, terantuk ke dinding atau meja ataupun alasan lainnya.

Sejumlah anggota yang menyampaikan kritik tersebut nampaknya kurang mempertimbangkan bahwa masih belum terbukanya korban KDRT terhadap perempuan lain atau kelompok, selalu dilatar belakangi oleh beberapa pertimbangan misalnya, masih ada anggapan untuk tidak mau membuka aib suami atau aib keluarga. Ketidak terbuka korban KDRT biasanya mempertimbangkan lingkungan sekitar, apakah lingkungan mereka mendukung korban atau justru mempersalahkan korban.

Dalam perjalanan penelitian dilakukan Capacity Building yaitu tentang advokasi dan menonton film tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan diskusi tentang Musrenbang serta diskusi tematik dengan tema Kesehatan Reproduksi dan Kesetaraan Gender. Di Balai Perempuan juga ada Yasinan yang dilakukan setiap hari Minggu dengan mendatangkan ungu (guru agama). Selain kelompok Yasinan juga dilakukan senam lansia. Kedua kegiatan ini diinisiasi oleh program WEMC yang dimotori oleh Sumarni Ali yaitu Narasumber WEMC di Bato dan juga Sekretaris Cabang KPI Pariaman.

4.4. Dampak balai perempuan bagi anggota

a. Secara Individu

Bagi anggota, keberadaan Koalisi Perempuan Indonesia bisa membawa perubahan cara berpikir tiap individu seperti yang disampaikan oleh Erayani, narasumber di Bato “*Nilai tambahnya adalah bertambah pergaulan, dari sisi pandang adalah bertambah. Cara berpikir kita adalah bertambah.....*” (Disarikan dari fieldnote Juni Warlif, wawancara dengan Erayani, 15 Oktober 2008).

Anggota Koalisi Perempuan terdorong untuk selalu memotivasi diri, itulah yang dilakukan oleh beberapa perempuan di Bato, seperti yang disampaikan seorang narasumber, “*Sebenarnya kalau kita punya keinginan, kita bersemangat. Jadi, kalau bersemangat apapun akan dilakukan. Coba lihat orang yang berambisi dia kan melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi, jangan takut-takut maju*”. (Wawancara dengan Erayani yang dilakukan oleh Juni Warlif, 15 Oktober 2008).

Aktif di berbagai organisasi, juga Koalisi Perempuan Indonesia, juga bisa meningkatkan kapasitas dan pengetahuan perempuan. Menurut Desi Novita perempuan haruslah berani melawan rasa takut dan harus punya keberanian. Perempuan harus meningkatkan kualitasnya melalui kursus-kursus. (Disarikan dari Fieldnote Juni warlif, wawancara dengan Desi Novita, 03 Desember 2008)

Dari berbagai pertemuan dan diskusi, anggota dapat melakukan berbagai pengalaman, persoalan dan menemukan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Bahkan Diskusi dalam Balai Perempuan, memperkuat perempuan untuk mengambil sikap atau menentukan pilihan terhadap dirinya sendiri termasuk untuk menentukan akan ikut KB atau tidak, seperti dialami oleh Fatmawati. Di desa Bato, masih banyak perempuan yang mengeluhkan tentang terbatasnya

informasi kesehatan yang mereka terima, khususnya informasi mengenai Keluarga Berencana (KB). Di samping itu masih ada suami yang tidak mendukung ketika istrinya ingin ber-KB, seperti yang dialami oleh Fatmawati narasumber WEMC golongan 1. Suaminya mengatakan “*manga lo ba KB, panyakik nan ka dapek nyo (buat apa ber KB, nanti malah akan mendatangkan penyakit)*” sementara saat itu mereka telah mempunyai 10 orang anak dengan status ekonomi lemah. Namun secara diam-diam dia minta pendapat dan saran dari perempuan yang lain. Akhirnya dia memutuskan untuk ikut KB tanpa diketahui oleh suaminya (Laporan FGD, 25 September 2007).

b. Secara Kolektif

Balai Perempuan dapat memberikan kekuatan secara individu dan maupun kekuatan secara kolektif. Kekuatan individu yang didukung oleh banyak anggota dalam Balai Perempuan dan ditindak lanjuti dalam tindakan nyata secara bersama, maka akan menjadi kekuatan kolektif.

Kesepakatan atas yang lahir dari pembahasan anggota Balai Bato untuk mendorong aparat Desa, khususnya kepala Desa untuk memberikan perhatian dan dukungan pada Balai Perempuan, adalah salah satu contoh inisiatif individu yang kemudian menjadi inisiatif kelompok. Meski upaya anggota Balai Perempuan untuk membuat Kepala Desa lebih terbuka kepada Balai Perempuan Bato belum sepenuhnya memberikan hasil, namun anggota Balai Perempuan tetap menjalankan kegiatan rutinnnya sekalipun tanpa ijin dan tanggapan positif kepala Desa ²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan kolektif akan tetap berjalan sekalipun dihadapkan pada tantangan dari luar, jika anggota-anggota dalam Balai Perempuan tetap mendukung.

Namun kekuatan kolektif dapat dengan mudah hancur atau terhenti jika pihak-pihak yang menjadi pendukung sebagai kekuatan kolektif tidak lagi memiliki satu semangat dan satu kesepakatan untuk bergerak bersama. Tersendatnya kemajuan simpan Bundo Kandung adalah salah satu contoh runtuhnya semangat kolektif, karena pihak-pihak dalam kekuatan kolektif tersebut tidak lagi memiliki semangat, tata kerja dan kesepakatan untuk secara bersama-sama mendukung dan memajukan simpan pinjam Bundo kandung. Ketiadaan transparansi, dominasi, rasa ingin menonjol sendiri, rasa saling tidak percaya, bahkan adanya rasa curiga yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam kelompok merupakan sebab utama runtuhnya kekuatan kolektif. Biasanya, sikap-sikap ini muncul sebagai akibat tidak dibangunnya tata kerja yang transparan sejak awal. Sikap tidak transparan dan saling curiga semakin berkembang jika tidak ada mekanisme komunikasi dan koordinasi antar pihak untuk melakukan klarifikasi pada setiap prasangka buruk. Kekuatan kolektif akan semakin lemah bila masing-masing pihak tidak lagi memiliki kerendahan hati dan memegang semangat kebersamaan untuk membangun kekuatan kolektif.

Dalam situasi diambang keruntuhan kekuatan kolektif, peran pemimpin untuk menetralkan keadaan dan membangun kembali tata kerja yang transparan dan semangat kebersamaan, sangat dibutuhkan kehadirannya. Kehadiran dan peran pemimpin mensyaratkan adanya netralitas dan keadilan dalam menimbang dan memutuskan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi situasi. Namun peran pemimpin sebagai pengendali akan sangat sulit dilaksanakan apabila pemimpin itu sendiri merupakan bagian dari pihak-pihak yang bersengketa atau bermasalah.

Dampak Balai Perempuan bagi Desa Bato Padusunan

Sekurang-kurangnya ada tiga hal penting yang dapat dilihat sebagai dampak Balai Perempuan bagi Desa Bato Padusunan. Pertama, Balai Perempuan memberikan ruang belajar

²⁹ Komunikasi dengan Ibu Sumarni Ali, Juli 2007.

bagi individu-individu untuk meningkatkan rasa percaya diri, berbagi pengalaman dalam mengatasi masalah dan menjadi ruang untuk berkumpul dan berserikat bagi perempuan.

Kedua, Balai Perempuan menjadi kekuatan kolektif untuk mengatasi kesulitan ekonomi, melalui dibentuknya tabungan simpan Pinjam Bundo kuduang. Meskipun hasil wawancara lapangan menunjukkan bahwa belum terwujud persamaan kesempatan bagi semua anggota untuk menikmati manfaat dan peran Simpan Pinjam Bundo kuduang dalam mengatasi masalah ekonomi.

Ketiga, balai perempuan menjadi kekuatan kolektif untuk melakukan resistensi kepada pimpinan aparat desa, terutama kepala desa yang memandang negatif terhadap pemenuhan hak atas kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis. Sikap kepala desa yang memberikan stigma negatif terhadap perempuan yang berorganisasi, dengan menganggap bahwa perempuan yang aktif di luar rumah adalah perempuan yang bermasalah, diabaikan oleh anggota Balai Perempuan dengan cara terus melakukan kegiatan walaupun tanpa seijin kepala Desa. Sikap kepala Desa yang masih dipengaruhi oleh kebijakan Orde Baru yang melarang masyarakat untuk membahas ataupun beraktivitas politik, tidak lagi dihiraukan oleh anggota Balai Perempuan.

Hadirnya program WEMC menambah peluang perempuan untuk mendapatkan informasi juga lebih terbuka, karena dalam diskusi-diskusi ataupun pertemuan di Balai perempuan, dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dan kebutuhan perempuan " perempuan sudah tahu dengan musrenbang dan bisa terlibat didalamnya. juga mengadakan pelatihan-pelatihan, pelatihan yang berupa BP, yang tadi itu kan pendidikannya itu terdiri dari HAM....gender....anggaran berbasis gender, politik dan analisis sosial, itulah yang diberikan kepada mereka, dan....apa namanya....tentang mengeluarkan pendapat mereka masing-masing "30

Walaupun tidak kenal banyak dengan Koalisi Perempuan Indonesia, Desi Novita salah satu narasumber yang juga adalah sekretaris desa Bato mengatakan :

"Koalisi Perempuan Indonesia itu mempunyai tujuan yang baik bagi perempuan yaitu memberdayakan perempuan. Dengan adanya kegiatan WEMC semakin terlihat, menggali persoalan-persoalan kemudian mendiskusikannya "31

Sebagai bagian dari pemerintah desa Bato Desi mengatakan sudah seharusnya lah kegiatan-kegiatan seperti ini didukung jika memang ada manfaatnya bagi masyarakat

5. Balai Perempuan di Korong Bungin

Adanya Balai Perempuan di Korong Bungin mampu menginspirasi pemerintahan setempat mulai dari Korong lain hingga Wali Nagari juga Kelompok Tani dan organisasi yang berafiliasi dengan pemerintah untuk aktif kembali.

Hal tersebut karena Balai Perempuan Korong Bungin mampu mendorong lahirnya inisiatif perempuan baik secara individu maupun kolektif untuk berjuang bagi kebaikan lingkungannya. Sesuatu yang selama ini sulit dibayangkan, mengingat secara geografis Korong Bungin berada di Nagari yang sulit mengakses air bersih dan jauh dari akses publik lainnya.

5.1 Profil Korong Bungin

Korong Bungin yang memiliki luas 231 ha merupakan salah satu korong yang terletak di Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman. Korong ini merupakan satu-satunya korong yang dipimpin oleh perempuan. Walaupun daerahnya cukup dekat dengan pusat pemerintahan (kecamatan dan kabupaten), namun

³⁰ Telisik lebih dalam pada laporan Talkshow Radio di Damai FM pada tanggal 25 februari 2009 dengan salah satu narasumber adalah Sumarni Ali .

³¹ Wawancara dengan Desi Novita tanggal 6 Maret 2009

transportasi yang sulit menyebabkan daerah ini menjadi terisolir dan sedikit lambat dalam mendapatkan informasi.

Korong Bungin terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Toboh Karambia, Dusun Bungin dan Dusun Badinah. Topografinya beragam mulai dataran tinggi, pebukitan dan daerah yang bergelombang (kesimpulan diperoleh melalui transek walk). Secara geografis Korong Bungin di sebelah selatan berbatasan dengan Korong Kabun Cimpago, di sebelah utara dengan Korong Tigo Sakato, di sebelah timur dengan Korong Ampalu dan Kampung Baru, serta di sebelah barat dengan Korong Simpang Kampung Tengah yang juga merupakan daerah dataran tinggi.

Masyarakat Korong Bungin mengalami kesulitan untuk memperoleh penyediaan air bersih. Sumber air utama berasal dari sungai kecil yang mengalir di desa itu, yang jauh dari perumahan penduduk. Pada musim kemarau, air sungai ini digunakan untuk segala aktifitas kehidupan (mandi, mencuci dan juga buang hajat dan juga sebagai sumber air bersih untuk mereka konsumsi). Masyarakat akan sangat kesulitan memperoleh sumber air bersih di musim kemarau karena aliran sungai menjadi sangat kecil.

Sumber air bersih lainnya adalah air hujan. Oleh sebab itu rata-rata di setiap rumah penduduk terdapat *Kulah* (bak penampungan air yang besar) untuk menampung air ketika musim hujan. *Kulah* ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. Penduduk pada umumnya mengkonsumsi air hujan ini untuk kebutuhan memasak.

Jumlah penduduk Korong Bungin 688 jiwa (367 jiwa perempuan dan 321 jiwa laki-laki). Jumlah kepala keluarga (KK) saat ini adalah 128 (dari data penduduk Nagari Lareh Nan Panjang tahun 2009). Dari jumlah KK tersebut 53 diantaranya adalah KK miskin. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, disamping itu ada juga yang berdagang dan wiraswasta lainnya.

Korong Bungin merupakan daerah asal ulama terkemuka Pariaman yang bergelar Syekh Madinah yang hidup dan dimakamkan di daerah tersebut. Syekh Madinah adalah guru dari ulama terkenal Syekh Burhanudin, penyebar agama Islam pertama kali di Pariaman.

Pengaruh syekh Madinah Syekh Burhanudin menyebabkan cara pandang beberapa masyarakat terhadap pemahaman agama juga berbeda dengan daerah yang lain. Masyarakat masih sangat percaya dengan apa-apa yang di sampaikan oleh Ungku (orang yang pemahaman agamanya cukup tinggi) sehingga berbagai kegiatan di lihat dan diuji, bertentangan atau tidak dengan ajaran agama yang berlaku. Dana bergulir kelompok-kelompok perempuan, dari program PNPM-MP (Programan Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan) tidak direspon dengan baik dana tersebut dikenakan jasa pinjaman. Menurut ungku jasa pinjaman tersebut adalah riba dan dilarang oleh agama.

Tingkat pendidikan masyarakat Korong Bungin relatif rendah. Dari data Kantor Wali Nagari Lareh Nan Panjang diketahui bahwa masyarakat Bungin yang tamat sekolah dasar hanyalah 16 orang, tamat SLTP 9 orang, tamat SLTA 12 orang dan yang mampu menyelesaikan perguruan tinggi 2 orang. Rendahnya tingkat pendidikan ini disebabkan oleh sulitnya perekonomian mereka sehingga banyak dari orang tua yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya. Disamping itu animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya, terutama anak perempuan juga rendah karena. Anggapan bahwa anak perempuan tidak perlu menuntut ilmu atau sekolah karena tugas utamanya adalah membantu orang tua di rumah, masih kuat dianut oleh masyarakat ini.

Dilihat dari banyaknya tanaman kelapa yang tumbuh di daerah ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kelapa lah yang menjadi komoditas utama daerah ini. Namun, akhir-akhir ini kelapa tidak bisa dijadikan sebagai produk unggulan, karena harga jualnya tidak bisa memberikan keuntungan yang maksimal bagi pemiliknya. Masyarakat juga ada yang menanam padi namun hasil yang mereka peroleh hanya cukup untuk memenuhi konsumsi rumah tangganya. Selain itu, sebagian masyarakat menanam tanaman perkebunan seperti coklat, pisang dan lain sebagainya.

Saat ini, pemerintah Nagari Lareh Nan Panjang mulai menggalakkan tanaman coklat (cacao) sebagai komoditas utama karena nilai jualnya cukup tinggi. Program Prima Tani siap mendampingi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pertanian tersebut terutama coklat. Kelompok Wanita Tani Bungin dan Balai Perempuan telah menjalin kerjasama dengan program ini.

Kegiatan industri rumah tangga juga sangat terbatas, walaupun dulu pada tahun 1990-an telah ada usaha membordir namun beberapa tahun terakhir usaha ini tidak ada lagi. Di Korong Bungin terdapat sebuah pabrik VCO (Virgin Coconut Oil) yang dikelola oleh kelompok usaha bersama yang bernama Bungin VCO (KUB Bungin VCO). Awalnya kegiatan ini memberikan manfaat positif bagi masyarakat, karena bisa membuka peluang kerja. Daerah pemasaran VCO ini bukan hanya di Korong Bungin atau Nagari Lareh Nan panjang tapi juga ke daerah lain di Sumatera Barat bahkan ke propinsi tetangga seperti Riau. Namun permintaan akan VCO ini tidak terus menerus, sehingga adakalanya produksi mereka harus berhenti karena persoalan distribusi dan pasokan. Kondisi terakhir KUB Bungin VCO menunjukkan bahwa produksi VCO sudah berhenti karena adanya konflik internal di tubuh pengurus yang disebabkan oleh ketidaktransparanan pengurus terhadap anggotanya.

Berbeda dengan desa Taluk dan Bato, yang sebelumnya telah sering mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari berbagai NGO dan LSM lokal, Korong Bungin baru mendapatkan pendampingan dari program WEMC.

Dalam hal-hal tertentu, perempuan di Bungin belum bisa mandiri untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan mereka karena mereka belum terbiasa untuk menyuarakannya. Namun dalam diskusi-diskusi yang diadakan oleh WEMC dan KPI sudah terlihat kemajuan yang dialami oleh perempuan di sana. Mereka sudah mulai berani untuk berbicara dalam forum diskusi tersebut, walaupun menurut pengakuan mereka ketika di musyawarah korong atau nagari yang pesertanya laki-laki dan perempuan mereka belum punya keberanian untuk berbicara, dengan alasan tidak percaya diri dan tidak paham dengan apa yang akan disampaikan.

5. 2 Pembentukan Balai Perempuan di korong bungin

Organisasi kemasyarakatan yang ada saat ini di Korong Bungin adalah Balai Perempuan, yang berdiri pada tanggal 6 Januari 2008 yang diprakarsai oleh program WEMC. Selain itu ada juga Kelompok Wanita Tani, Karang Taruna, Kelompok Wanita, Yasinan dan Arisan Baralek (pesta perkawinan) dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) yang kegiatannya berpusat di Kantor Wali Nagari Lareh Nan Panjang dengan kegiatan utamanya posyandu.

Sejak berdirinya Balai Perempuan ini barulah masyarakat khususnya perempuan mempunyai ruang untuk berdiskusi. Kegiatan ini lah yang menjadi media pendidikan bagi mereka. Dengan demikian kita tidak bisa menyamakan perkembangan mereka dengan perempuan yang ada di Desa Taluk dan Bato.

Anggota Balai Perempuan di Korong Bungin telah menetapkan bahwa persoalan utama yang menjadi skala prioritas mereka adalah persoalan ekonomi. Secara individu, strategi yang dikembangkan perempuan informan untuk memberdayakan dirinya, terkait dengan persoalan ekonomi cukup variatif, seperti berdagang, bertani dan merantau.

5.3. Aktivitas Balai dalam situasi dan waktu

Pada bulan Juli 2008, dimulailah penggalan data untuk pendalaman isu. Selanjutnya dilakukan Focus Group Discussion untuk mensosialisasikan hasil temuan penelitian tahun 2007 dan menentukan isu prioritas utama masing-masing wilayah penelitian, Bulan Agustus 2008. Balai Perempuan Bungin kemudian memilih masalah ekonomi sebagai isu prioritasnya (lihat fieldnote FGD yang dilakukan 3 Wilayah penelitian

Dalam diskusi Balai Perempuan, pada 21 November 2008, munculah inisiatif anggota untuk mengaktifkan Balai Perempuan, guna menjawab persoalan yang dihadapi oleh perempuan

Bungin, yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan perempuan. Maka dipilihlah kegiatan seperti bertani dan beternak sebagai sarana peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan anggota dilakukan penguatan kapasitas dikelompok yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan.

Pada 25 November 2008, Wali Korong Bungin dan lima orang utusan termasuk peneliti (Felmi Yetti) menghadiri kegiatan Prima Tani di Ampalu Nagari Lareh Nan Panjang dengan tujuan bisa menyampaikan keinginan Balai Perempuan kepada Tim Prima Tani Nagari Lareh Nan Panjang untuk bekerjasama. Tim Prima Tani menyambut baik keinginan tersebut karena kegiatan Balai Perempuan Bungin relevan dengan program Prima Tani. Sebagai tindak lanjut, disepakati akan ada pertemuan dengan seluruh anggota Balai Perempuan Bungin dan Tim Prima Tani, yang kemudian terselenggara pada 16 Desember 2008.

Hasil diskusi pada 16 Desember 2008 menyepakati bahwa Prima Tani mendukung keinginan Balai Perempuan Bungin untuk fokus pada kegiatan pertanian dan peternakan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Disepakati juga bahwa KWT (Kelompok Wanita Tani) merupakan bagian dari kegiatan Balai Perempuan, sehingga tidak perlu lagi dibentuk KWT di Korong Bungin, karena yang akan menjadi anggotanya adalah juga anggota Balai Perempuan (disarikan dari filednote Felmi Yetti tanggal 16 Desember 2008)

Pertemuan Balai Perempuan dengan Prima Tani, pada 30 Desember 2008, membahas komoditas pertanian dari hasil pertanian lokal yang ada di Bungin seperti membuat Nata De Kakao, membuat makanan dari ubi, membuat gula merah, budidaya tanaman pisang, membuat keripik pisang, menanam Kakao, dan membuat kandang yang sehat dan ideal. (Disarikan dari fieldnote Felmi Yetti tanggal 30 Desember 2008).

Sebagai tindak lanjut diskusi, diselenggarakan pelatihan membuat keripik pisang, pada 13 Januari 2009, dengan difasilitasi oleh Ibu Elmi dari Dinas Pertanian, anggota Tim Prima Tani Lareh Nan Panjang. Sejumlah 15 orang anggota Balai Perempuan menjadi peserta pelatihan itu. Satu orang diantaranya adalah Narasumber WEMC yaitu Ermawati yang kemudian menerapkan hasil pelatihan membuat keripik pisang tersebut.

Dari diskusi antara Prima Tani dan peneliti (Felmi Yetti) berkembang ide untuk menyampaikan rencana kelompok selanjutnya dan rencana untuk mengadakan lomba cerdas cermat yang diselenggarakan pada 14 April 2009. Rencana kelompok lainnya adalah mengisi kegiatan kelompok di Balai Perempuan Bungin dengan diskusi rutin untuk berbagi pengalaman dan saling mendukung sesama anggota kelompok.

Kegiatan pelatihan lainnya adalah membuat "Bubur Kalifornia" dengan bahan dari belerang untuk membasmi jamur pada tanaman pertanian yang diselenggarakan pada 16 April 2009 di BPP Pertanian Balah Air Kecamatan VII Koto Sungai Sariak.

Perkembangan Balai Perempuan Bungin di bidang pertanian dan peternakan serta usaha pengolahan hasil pertanian menjadi perhatian Manejer Prima Tani Dr. Ishak Manti, MS. Mengingat keberhasilan Balai Perempuan Bungin, Dr. Ishak Manti menyarankan agar dilakukan pendampingan yang intensif bagi anggota kelompok sehingga bisa mendapatkan data bukan hanya soal teknis pertanian, melainkan juga soal sosiologi masyarakat.

a. Strategi Individual

Anggota Balai Perempuan di Korong Bungin telah menetapkan bahwa persoalan utama yang menjadi skala prioritas mereka adalah persoalan ekonomi. Secara individu, strategi yang dikembangkan perempuan informan untuk memberdayakan dirinya, terkait dengan persoalan ekonomi cukup variatif, seperti berdagang, bertani dan merantau.

Ermawati, seorang ibu rumah tangga dengan 5 orang anak, sejak kecil telah terbiasa melakoni banyak pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, mulai dari berdagang, memetik sayur lalu menjualnya di pasar. Pernah juga dia mencoba merantau ke Padang bekerja sebagai buruh harian di gudang hasil bumi. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan

ekonomi keluarganya banyak usaha yang dilakukannya, seperti berdagang dan membuat keripik pisang.³²

Kegiatan Balai Perempuan di bidang pertanian dan pengolahan hasil pertanian berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga serta mengubah relasi kerja sama antara suami, anak dan isteri dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Sebagaimana pengalaman Ermawati yang awalnya hanya membuat keripik pisang dari pisang yang ditanam di belakang rumahnya. Ermawati menjual keripiknya pada 3 warung di dekat-dekat rumah, seminggu kemudian bertambah jadi 10, 16, dan 24 warung dan bisa menambah pendapatan keluarga mereka Rp. 20.000,- /hari pada bulan pertama. Dalam perbincangan tanggal 16 April 2009, Ermawati penghasilannya sudah meningkat menjadi Rp. 50.000,- / hari. Sekarang pasaran keripik pisangnya sudah sampai ke Padang. Pemasarannya dibantu oleh anaknya yang bekerja di sebuah supermarket yang ada di Kota Padang. Akhirnya usaha keripik pisang ini menjadi usaha bersama dalam keluarga. Suaminya yang awalnya berjualan ikan keliling, akhirnya memutuskan untuk membantu mencari pisang mentahnya dan mengantarkan keripik pisang ke warung-warung langganan mereka

Berbeda dengan Ermawati, apa yang menimpa Fitriyanti yang saat ini menjabat sebagai kepala Korong Bungin, pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ketika hidup di rantau bersama suaminya. Dia memilih pulang ke kampung dan berpisah dengan suaminya.

*“Saya merespon ajakan, saat nenek mengajak berdagang. Dan akhirnya saya berdagang menjual ketupat lamak berkuah cabe. Karena ketupat itu laris, maka saya mulai merasa kecanduan, hilang rasa malu berjualan dari kampung ke kampung. Semangat datang karena ketupat itu laris dan saya bisa memperoleh uang dari penghasilan sendiri”.*³³

Dari berbagai strategi yang dipilih oleh perempuan di Korong Bungin untuk dapat keluar dari persoalannya, pada satu titik tertentu ternyata menemukan pusran yang sama yaitu berdagang untuk mencapai kemandirian ekonomi. Upaya berdagang ini mampu membuat mereka keluar dari lingkaran persoalan sekaligus memberi kesempatan mereka untuk tetap bisa berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas.

c. Secara Kolektif

Banyak cara yang biasanya dilakukan oleh beberapa perempuan narasumber ketika ingin aktif di luar rumah. Ada yang ikut kelompok SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) di nagari dan ada yang ikut kelompok Yasinan. (Disarikan dari Fieldnote Felmi Yetti, 24 Agustus 2008). Di Bungin mereka juga membentuk KUB VCO (Kelompok Usaha Bersama, Virgin Coconut Oil). Ada kegiatan PKK sebagai alternatif bagi perempuan untuk bisa berkegiatan di luar rumah

Felmi Yetti sebagai peneliti juga banyak mendapatkan pengalaman yang berharga dari ibu-ibu anggota Balai Perempuan di Bungin, antara lain bersilaturahmi dengan seluruh anggota Balai Perempuan Bungin sebagai strategi untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan merasakan bahwa orang lain merupakan bagian dari diri kita sendiri sehingga menjadi dasar menuju gerakan kolektif.” (08 Oktober 2008)

Fitriyanti sebagai kepala Korong Bungin juga mengatakan bahwa ketika dia ikut dalam sebuah organisasi maka pengalaman dan pergaulan akan bertambah. Dia juga mengatakan

³² Disarikan dari fieldnote Felmi Yetti pada tanggal 13 November 2008

³³ idem

bahwa sejak bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia pergaulan dan pengalamannya bertambah sehingga terbuka cakrawala pemikirannya. (disarikan dari fieldnote Felmi Yetti , 13 November 2008).

Bukti nyata dari gerakan kolektif di Korong Bungin pada fase penelitian adalah dengan berhasilnya Balai Perempuan Bungin menjalin kerjasama dengan Program Prima Tani Dinas Pertanian dalam bentuk kegiatan-kegiatan peningkatan keterampilan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Meski baru tahap permulaan, namun kerjasama ini memberi semangat yang luar biasa bagi perempuan Bungin.³⁴

Selain itu perempuan Bungin bisa berpartisipasi dalam Musrenbang yang dilaksanakan di Kantor Wali Nagari Lareh Nan Panjang. Meski partisipasi mereka masih terbatas pada kehadiran di dalam musrenbang.³⁵

5.4 Dampak Balai Perempuan bagi anggota

Dengan adanya Balai Perempuan di Korong Bungin yang berdiri tanggal 6 Januari 2008, yang di inisiasi oleh kegiatan WEMC menjadi wadah nyata bagi perempuan Bungin untuk berkratifitas. Balai Perempuan menjadi wadah pendidikan kritis bagi mereka, dimana satu sama lain saling menimba ilmu. Umumnya mereka mengatakan bahwa setelah mengikuti kegiatan di Balai Perempuan, pengetahuan mereka menjadi bertambah, sudah berani bicara di depan umum dan juga sudah mulai berani mengemukakan pendapat (Disarikan dari filednote Juni Warlif, 06 Mei 2009). Setidaknya ada beberapa dampak positif yang bisa diuraikan sebagai berikut :

- Adanya wadah untuk berkumpul mencari ilmu dan tempat berdiskusi sesama anggota Balai perempuan.
- Bertambah eratnya silaturahmi diantara perempuan yang dulunya hanya bergerak secara individu dalam menyelesaikan masalah kini sekarang sudah dilakukan secara bersama-sama.
- Adanya kegiatan rutin yang dilakukan dengan menggunakan forum Yasinan, yang pertemuannya dilakukan setiap satu minggu sekali. Hal ini tidak pernah ada sebelumnya.
- Adanya kegiatan pertanian dan pelatihan keterampilan (seperti membuat keripik pisang, membuat serundeng pisang, membuat kandang ternak ideal, beternak ayam kampung, penanaman lahan pekarangan) sebagai strategi pemberdayaan ekonomi yang dipilih perempuan di Korong Bungin. Pilihan strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan melimpahnya hasil kebun sebagaimana diatas. Selama ini pisang hanya untuk dimakan begitu saja tanpa dioleh, setelah adanya inisiatif mengolahnya ternyata mampu menghasilkan uang yang dapat menopang ekonomi keluarga.
- Bertambahnya pengetahuan anggota diberbagai hal diantaranya adalah a) paham dan tahu akan kesehatan reproduksi sehingga mampu melindungi dan mengambil keputusan terkait dengan kesehatannya. B) bertambahnya pengetahuan akan apa yang dimaksud kesetaraan gender yang dipraktekan dengan mulai adanya pembagian kerja dalam rumah tangga. C) Musrenbang yang lalu diimplementasikan dengan keterlibatan anggota pada rapat Musrenbang di Korong maupun Nagari, dimana ini menjadi keterlibatan pertama kalinya perempuan di Musrenbang dalam sejarah Korong dan Nagari. D) Lebih jauh keterlibatan anggota sebagai kader posyandu dan seksi/ bagian lain di struktur pemerintahan lokal.
- Dapat berdiskusi dengan anggota dari Balai Perempuan lain, ketika terjadi diskusi yang dilakukan di kampung mereka. Dalam hal ini biasanya diskusi dilakukan di kantor wali Korong. Salah seorang Narasumber di Bungin mengatakan bahwa setelah mengikuti

³⁴ silahkan dibaca dalam fieldnote Felmi Yetti pada tanggal 16 November, 16 Desember, 30 Desember 2008 dan 20 Januari 2009

³⁵ silahkan dibaca lebih jauh dalam filednote Felmi Yetti bulan Februari 2009.

kegiatan di Balai perempuan banyak sekali manfaat yang telah dia rasakan, seperti berkesempatan untuk ikut diskusi, mengajak anggota yang lain, mengadakan pertemuan, dialog, wawancara dan segala macam. sampai sekarang berlanjut sekali sebulan, terus berlanjut membentuk senam lansia di Bungin Kpi ini sangat bermanfaat kepada masyarakat.³⁶

Namun dampak positif ini tidak hanya dirasakan oleh perempuan yang menjadi anggota, bagi perempuan lain yang belum menjadi anggota pun ternyata ada hal positifnya yaitu : perasaan senang melihat kegiatan Balai Perempuan yang berjalan di kampung mereka sehingga mereka juga tertarik untuk ikut diskusi. Bahkan lebih dalam lagi adanya perempuan-perempuan diluar anggota yang merasa termotivasi setelah melihat ada anggota yang sudah sukses menerapkan hasil pelatihan seperti Uni Er, Uni Anis, dan Uni Nun, keberanian ini ditunjukkan dengan sudah beraninya mereka mengeluarkan pendapat. Kepercayaan diri mereka meningkat, ditambah mereka memiliki kesempatan untuk berbicara di radio yang merupakan pengalaman pertama bagi Ramuni dan Fitriyanti.

Dari catatan lapangan lfeL tanggal 13 November 2008 ditemukan bahwa kegiatan di Kelompok telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap kaum perempuan, seperti : menjadi lebih bersemangat, Bisa bertukar pikiran, Tidak tahu menjadi tahu, Berani berdiri di depan, Ada solusi dari masalah, Mendapatkan celah atau peluang dari masalah, Perasaan jadi tenang, Membuka lapang pikiran, Perasaan saling dekat, Saling kerjasama, Saling merasakan kesulitan teman, Senasib sepenanggungan.

5.5 Dampak Balai Perempuan bagi Korong Bungin

Secara umum ternyata Balai Perempuan juga berdampak pada kondisi di Korong Bungin maupun nagari. Bagi masyarakat di Korong Bungin berikut beberapa dampak positif yang terekam dalam laporan penelitian:

- Kegiatan di kantor wali korong, yang sebelumnya sangat jarang kini selalu buka dan ramai karena dijadikan tempat pertemuan balai perempuan.
- Kantor wali korong bersih sehingga masyarakat lain yang datang untuk membicarakan/ menyelesaikan masalah yang terjadi menjadi sangat nyaman. Hal ini berbeda jauh dengan kondisi sebelumnya dimana kantor Wali Korong hanya jadi tempat orang menggembala sapi.
- Adanya apresiasi dari Wali Nagari akan kegiatan Korong Bungin yang produktif sehingga selalu dijadikan rujukan dan contoh bagi Korong yang lain. Hal ini sangat membanggakan mengingat Korong Bungin adalah satu-satunya Korong yang dikepalai oleh Perempuan (Fitri Yanti yang biasa disapa Uni Upik).
- Bertambah kuatnya Wali Korong Perempuan dengan seringnya ikut diskusi tentang pemberdayaan perempuan dengan WEMC-KPI. Penguatan ini tidak hanya dalam wacana namun juga dalam hal strategi yang digunakan dalam menghadapi strategi pelemah.
- Adanya inisiatif dari Balai Perempuan untuk melakukan kegiatan perayaan 17 Agustus, hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya, hal ini mendapat apresiasi yang besar dari Nagari juga masyarakat karena semua orang dari lintas usia dan latar belakang bisa menikmati dan berpartisipasi di dalamnya.
- Keberadaan Balai Perempuan Bungin sebagai kelompok perempuan yang kuat dibuktikan dengan sudah bisanya menjalin kerjasama dengan program lain seperti Prima Tani yang ada di nagari Lareh nan Panjang. Kerjasama ini membuka akses perempuan terhadap ekonomi.
- Aktifnya kegiatan yasinan yang diinisiasi oleh anggota Balai Perempuan membuka jejaring dengan yasinan korong lain sehingga menambah kekompakan kaum perempuan

³⁶ Lihat lebih jauh dalam Transkrip pertemuan Monev yang diselenggarakan di Desa Taluk pada tanggal 4 Mei 2009

di nagari. Materi diskusi keagamaan yang selama ini lebih banyak pada hubungan dengan Allah SWT, mulai dipilih berdasarkan kebutuhan pengetahuan jamaahnya, misalnya mengenai menstruasi dan Islam, Hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.

- Terlibatnya Wali nagari dalam mendukung kegiatan perempuan di Korong Bungin diantaranya terlihat dari kesediaanya dalam menyiapkan berbagai hadiah saat lomba cerdas cermat yang dilakukan di Balai Perempuan Bungin dilakukan.

BAB VI ANALISA DAN PEMBELAJARAN

6.1 Analisa Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa di tiga area penelitian yaitu, Desa Bato, Desa Taluk, dan Korong Bungin memiliki sejarah yang berbeda-beda dalam proses pembentukannya, yang berdampak pada perkembangannya.

Desa Bato Padusunan terbentuk di periode awal berdirinya Koalisi Perempuan Indonesia mengikuti top down strategi yang diberlakukan saat itu. Hal ini berimbas pada lemahnya inisiatif anggota untuk mengaktifkan Balai Perempuan, hal ini terlihat dari tidak adanya aktivitas yang dilakukan secara keorganisasian, lebih pada individu perempuan.

Balai Perempuan Korong Bungin berdiri salah satu faktor pendukungnya adalah adanya program WEMC sehingga membuat intensitas pertemuan dengan focal poin yang ada di Korong Bungin lebih teratur. Adanya penelitian aksi ini (wawancara dan pertemuan narasumber), mampu menyatukan perempuan yang selama ini hanya berkuat pada wilayah domestik dan tidak punya ruang bersosialisasi. Diskusi yang dilakukan menjadi pembuka informasi bagi perempuan di Korong Bungin sehingga mereka bersemangat untuk bergabung menjadi anggota Koalisi Perempuan Indonesia dan membentuk Balai Perempuan. Dampak dari adanya Balai Perempuan yang diinginkan sendiri oleh perempuan adalah semangat yang tinggi untuk berkumpul, meskipun inisiatif sebagian besar masih bertumpu pada peneliti dan ketua Balai Perempuan.

Sedangkan Koperasi Buluh Perindu berdiri atas inisiatif anggota Koalisi Perempuan yang mampu menggerakkan anggota lainnya. Koperasi ini diharapkan menjadi Balai Perempuan,. Namun karena proses pembentukannya tidak memenuhi standard organisasi, maka koperasi Buluh Perindu dianggap sebagai Balai Perempuan dengan penulisan "Balai Perempuan". Anggota Koalisi Perempuan Indonesia cukup banyak dan telah bergabung cukup lama. Seiring dengan program penelitian WEMC aktivitas yang ada cukup tinggi. Perempuan di Taluk bersemangat dan sangat kritis, hal ini ditunjukkan dengan inisiatif pemberdayaan yang mereka lakukan baik secara individu, kolektif maupun organisasi. Bahkan keberdaan mereka diakui oleh pemangku kepentingan sampai tingkat kabupaten Padang Pariaman.

Dengan tiga latar belakang yang berbeda tersebut, ternyata menunjukkan bahwa inisiatif pemberdayaan perempuan tidak bergerak linear dan serta merta terkena dampak ketika singgungan di struktur organisasi baik vertikal maupun horizontal yang ada di atasnya.

Pertanyaan-pertanyaan operasional penelitian terjawab sebagai berikut:

1. Bagaimana Balai Perempuan mendorong munculnya inisiatif perempuan untuk menghadapi berbagai faktor pelemah pemberdayaan?

Upaya dan strategi Balai Perempuan dalam mendorong tumbuh kembangnya inisiatif perempuan melalui penyelenggaraan pertemuan rutin untuk melakukan diskusi. Balai Perempuan membuka ruang bagi setiap anggotanya untuk mengusulkan tema-tema atau masalah-masalah yang hendak dibahas dalam setiap pertemuan. Pembahasan berbagai persoalan dalam Balai Perempuan diikuti dengan rencana tindak lanjut dan pembagian peran untuk melaksanakan rencana tindak lanjut.

Faktor pelemah Balai Perempuan berasal dari dua sisi, yaitu faktor dari sisi eksternal dan faktor dari internal.

Faktor pelemah dari sisi eksternal adalah adanya berbagai kebijakan pemerintah daerah

dalam bentuk Peraturan Daerah, Penyediaan Layanan Publik, sikap aparatus yang tidak memihak dan interpretasi ajaran agama yang tidak menguntungkan perempuan. Faktor pelemah dari sisi eksternal ini membutuhkan serangkaian strategi untuk membangun kesadaran kritis dan melakukan kerja-kerja advokasi dalam menghadapi, menghapuskan atau meminimalisir faktor pelemah dari sisi eksternal ini.

Sedangkan faktor pelemah dari sisi internal terkait dengan kejelasan tujuan setiap kegiatan, manajemen Balai Perempuan sebagai suatu organisasi dan manajemen anggota Balai Perempuan sebagai individu-individu yang memegang peran penentu keberlanjutan berbagai strategi dan kegiatan dalam Balai Perempuan.

Penanganan terhadap faktor pelemah dari sisi internal sangat bergantung terhadap empat (4) hal utama, yaitu : 1) kepemimpinan (*Leadership*) yang mampu mengelola dan mengendalikan situasi, 2) komunikasi antar anggota maupun antara anggota dan pimpinan yang terbuka, transparan dan bersandar pada nilai-nilai dan prinsip organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), terutama nilai-nilai persaudaraan sesama perempuan, saling mendukung, saling menghormati, anti kekerasan dan anti diskriminasi, 3) adanya etiket baik dan kehendak untuk memelihara Balai Perempuan untuk kepentingan bersama, dan 4) terpeliharanya mekanisme organisasi yang dikelola berdasarkan kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas.

2. Bagaimana hubungan Balai Perempuan dengan anggota, pengurus dan struktur yang lebih tinggi ?

Hubungan antara Balai Perempuan dengan anggota, pengurus dan struktur yang lebih tinggi merupakan bagian dari dinamika organisasi, baik dalam Balai Perempuan maupun dinamika organisasi secara keseluruhan dalam Koalisi Perempuan Indonesia.

Pada Koperasi Buluh Perindu yang diperlakukan sebagai “Balai Perempuan” terdapat hubungan kerja sama yang sangat erat dan saling mendukung antar anggota. Adanya kepemimpinan yang sangat kuat, yang mampu meyakinkan inisiatifnya sebagai jalan untuk meningkatkan taraf hidup anggota, menjadikan Balai Perempuan sebagai kekuatan kolektif untuk mencapai tujuan bersama termasuk untuk membangun jejaring kerja dengan berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah Desa. Namun kepemimpinan yang kuat ini memiliki potensi negatif dalam bentuk penciptaan ketergantungan anggota terhadap pemimpinnya. Hubungan antara pimpinan Koperasi buluh Perindu dengan struktur di atasnya, baik pengurus cabang maupun pengurus wilayah tidak terlalu jelas. Hal ini terlihat dari kurang dipahaminya oleh pimpinan Koperasi Buluh Perindu tentang syarat-syarat dibangunnya Balai Perempuan yaitu melalui pemahaman AD/ART bagi semua anggota, pendidikan politik dan keharusan hadirnya pimpinan cabang untuk mengesahkan Balai Perempuan.

Lebih dari itu, Balai Perempuan tidak dapat dibangun identik dengan koperasi, karena koperasi bersifat sebagai organ taktis untuk bagi Balai Perempuan.

Jika pengurus cabang dan wilayah menginformasikan syarat-syarat terbentuknya Balai Perempuan dan atau pimpinan Koperasi Buluh Perindu mengkomunikasikan rencananya untuk mendirikan Balai Perempuan, maka peristiwa Koperasi Buluh Perindu yang tidak dapat diakui keabsahannya sebagai Balai Perempuan tidak akan terjadi.

Untuk memahami bagaimana perempuan menerjemahkan dan menganalisa kekuatan internal Balai Perempuan. Mengenal pola relasi yang mereka lakukan dengan struktur yang lebih tinggi serta analisa mereka terhadap kenyataan hidup mereka sendiri. Hal ini perlu dikaji karena meskipun perempuan dapat mengidentifikasi, menjelaskan dan menganalisa kekuasaan yang melemahkan mereka, namun seringkali perempuan tidak memiliki harapan untuk pemberdayaan mereka sendiri dalam kondisi dan situasi dimana mereka berada..

Pada Balai Perempuan Bato, Kekuatan Balai Perempuan sebagai kekuatan kolektif terlihat semu. Hal ini terlihat dari tersendatnya berbagai kegiatan Balai Perempuan, Perebutan

kekuasaan dan rasa saling curiga dalam simpan Pinjam Bundo Kandung, serta adanya komunikasi yang tidak sehat antar anggota yaitu sebagian anggota membicarakan secara negatif anggota lain di luar sepengetahuan pihak yang dibicarakan. Demikian juga dengan sikap anggota yang membicarakan pimpinan Balai Perempuan maupun pimpinan cabang secara negatif dibelakang pihak yang dibicarakan. Pola komunikasi antara anggota maupun antar anggota dengan pimpinannya cenderung melemahkan masing-masing individu dan menyalahi prinsip dan nilai-nilai dalam Koalisi Perempuan Indonesia. Pelemahan pada masing-masing individu ini pada akhirnya akan berakibat pada pelemahan Balai perempuan sebagai organisasi maupun sebagai kekuatan kolektif. Pada gilirannya, pelemahan dari dalam ini akan memancing pelemahan dari pihak luar seperti: pemenaran terhadap stigma bahwa jika perempuan berkumpul mereka akan bertengkar dan saling menjatuhkan.

Balai Perempuan di Korong Bungin, lahir atas prakarsa WEMC dan didukung oleh anggota-anggota dalam Balai Perempuan tersebut. Hal ini disebabkan berbagai kegiatan yang disepakati dan ditindak lanjuti dalam Balai perempuan memberikan manfaat bagi anggotanya. Peran sentral peneliti WEMC dalam menghubungkan dengan pihak-pihak pemerintah, universitas maupun media sangat kuat. Anggota Balai Perempuan sangat senang terhadap perkembangan yang terjadi pada diri dan keluarganya maupun perubahan yang terjadi pada Balai Perempuan. Namun relasi antara peneliti WEMC dengan Balai Perempuan dan anggota Balai Perempuan memiliki potensi bahaya dan risiko yaitu terjadinya ketergantungan anggota Balai Perempuan maupun jejaring kerja dengan Balai Perempuan dengan peneliti. Di khawatirkan jika proyek penelitian WEMC ini berakhir, dan tidak ada proses alih kepemimpinan dan kaderisasi, maka Balai perempuan tersebut akan terhenti setelah ditinggalkan oleh penelitinya. Atau terjadi kemungkinan buruk lain, yaitu Balai Perempuan tersebut hanya fokus pada persoalan ekonomi dan meninggalkan Fungsi Balai Perempuan sebagai penggerak dalam organisasi dan masyarakat untuk mendorong terwujudnya keadilan dan demokrasi.

3. Kemungkinan-kemungkinan pemberdayaan apa yang dilakukan di Balai Perempuan di Padang Pariaman pada kehidupan nyata mereka, dihadapkan pada akses perempuan terhadap ekonomi, kesehatan dan partisipasi politik?³⁷

Pembentukan Koperasi Buluh Perindu di Desa Taluk, Simpan Pinjam Bundo Kandung di desa Bato Padusunan dan Usaha tani dan peternakan serta pengolahan hasil pertanian beserta pemasarannya di Korong Bungin memberikan dampak nyata pada kehidupan ekonomi anggota-anggota Balai perempuan. Meskipun, terjadi pengecualian yaitu anggota Balai perempuan menyatakan bahwa tidak semua anggota dapat merasakan manfaat dari Simpan Pinjam Bundo Kandung. Dukungan Pemerintah desa dan daerah terhadap koperasi Buluh Perindu dan Usaha tani dan ternak menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dianggap positif dan layak dianggap sebagai bagian dari pemberdayaan perempuan serta pemberi solusi atas problem ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.

Keberhasilan di bidang ekonomi berdampak pada terbukanya ruang dialog antara Balai Perempuan dengan aparat Desa. Terbukanya ruang dialog ini kemudian ditindak lanjuti dengan peningkatan partisipasi politik perempuan, khususnya partisipasi dalam mengikuti berbagai pertemuan di desa maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang desa).

Namun demikian akses perempuan terhadap kesehatan masih menjadi persoalan besar di ketiga desa/nagari yang menjadi obyek penelitian. Berbagai diskusi bidang kesehatan yang dilakukan oleh ketiga Balai menunjukkan adanya kesadaran anggota tentang pentingnya kesehatan (termasuk Keluarga Berencana). Namun pada saat yang sama anggota Balai

³⁷ *Ibid*

perempuan menilai bahwa negara tidak menyediakan layanan kesehatan yang memenuhi standard masyarakat yaitu layanan kesehatan yang mudah, murah, terjangkau dan berkualitas.

Dalam berbagai hasil wawancara dapat dikaji bahwa penguasaan informasi dan pengetahuan serta kesempatan berbicara, penguasaan ekonomi, kemampuan merumuskan masalah serta solusi yang ditawarkan merupakan sumber-sumber kekuasaan dan kekuatan bagi perempuan untuk memperoleh peran dan posisi yang setara dan adil antara laki-laki dan perempuan. Penguasaan terhadap sumber-sumber kekuasaan juga merupakan kekuatan bagi perempuan untuk menghadapi berbagai bentuk pelemahan.

4. Bagaimana Balai Perempuan berjejaring dengan pemangku kepentingan dan organisasi lainnya dalam merujuk, menahan, dan menghadapi tantangan pemberdayaan?

Balai Perempuan berjejaring dengan kuatan adat seperti Bundo kanduang, pimpinan Nagari, Kepala Desa, dinas-dinas dalam pemerintah daerah (dinas pertanian, dinas koperasi dan dinas perdagangan) untuk menghadapi berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapinya. Balai Perempuan juga berjejaring desan sesama elemen masyarakat sipil lainnya seperti PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga), Kelompok pengajian, Kelompok Keswadayaan masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat seperti WALHI dan Solidaritas Perempuan. Selain itu, Balai Perempuan juga berjejaring dengan radio untuk menjangkau masyarakat luas dan membangun opini publik.

6.2 Pembelajaran Penelitian

Dari perjalanan Balai Perempuan diatas, beberapa masukan berharga bisa menjadi jalan untuk melakukan konsolidasi organisasi di tingkat Balai Perempuan, seperti yang disampaikan oleh Fitriyanti sebagai Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia di Sumatera Barat:

“Harus ada pengorganisasian, karena di dalam kosep di nasional itu, harus ada pengorganisasian kelompok. Bundo Kanduang punya dana tetapi tidak punya kelompok. Di situlah kemudian ada kerjasama antara Koalisi Perempuan Indonesia wilayah dengan Bundo Kanduang...”

“Keberadaan Balai Perempuan desa Bato itulah yang memungkinkan masuknya program life skill. Salah satunya unit Simpan Pinjam Perempuan. Kegiatan tersebut yang dikelola oleh satu unit yang diberi nama Bundo Kanduang. Anggota Balai Perempuan sekaligus menjadi anggota simpan pinjam Bundo Kanduang. Program lifeskiil ini tidak akan ada kalau tidak ada Balai Perempuan

Meskipun pernyataan di atas ini masih perlu direfleksikan apakah terbentuknya Balai Perempuan dengan pola demikian akan mampu membawa pemberdayaan yang dicita-citakan organisasi, yang menempatkan inisiatif perempuan sebagai semangatnya. Kata pengorganisasian menjadi penting untuk direfleksikan bersama. Balai Perempuan di desa Bato memang masih perlu banyak dibenahi. Konflik dan solidaritas kelompok Balai Perempuan desa Bato selama ini menjadi salah satu catatan tugas selanjutnya untuk melakukan pembenahan. Sebab jika dibiarkan berlarut-larut maka yang terjadi adalah kemandekan organisasi sehingga menghambat proses pemberdayaan.

Program penelitian WEMC yang dimulai sejak pertengahan tahun 2006 di Sumatera Barat lalu mengerucut pada Padang Pariaman telah banyak memberikan pencerahan bagi perjalanan Balai Perempuan dan kehidupan perempuan khususnya di desa Taluk, Bato dan Korong Bungin.

Banyak narasumber merasakan manfaat dari keterlibatan mereka di dalam kegiatan WEMC. Manfaat yang dirasakan antara lain ialah terjadinya peningkatan kapasitas individu

maupun kelompok, meningkatnya kepercayaan diri dan keberanian berbicara di depan umum terbukanya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan seperti ikut Musrenbang desa.

Di samping itu, terbangun relasi yang setara anggota Balai Perempuan dengan suami mereka di dalam rumah tangga sudah. Seorang narasumber, menyatakan bahwa ia mampu mengatakan apa yang dirasakannya secara jujur kepada suaminya tanpa khawatir kejujuran ini akan menimbulkan perselisihan antara dia dan suaminya. Ini dapat kita lihat dari pengalaman Yendrawati.

“Jadi kayaknya untuk kebutuhan rumah tangga 80% tanggung jawab saya...saya bilang padanya, saya tidak perlu uang yang banyak, dalam berumah tangga itu yang penting adalah kejujuran dan saling mempercayai” (Disarikan dari transkrip wawancara dengan Yendrawati, 26 Februari 2009)

Meningkatnya kesadaran individu untuk memiliki kebutuhan berorganisasi dalam sebuah kelompok. Munculnya kesadaran dari berdiskusi dan berdialog bahwa ternyata perempuan memiliki kepentingan yang sama. Dengan berkelompok mereka terbantu untuk menggali hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka, belajar bersama untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan kehidupan mereka, kemudian bersama-sama membuat prioritas dari persoalan itu, seperti yang diungkapkan oleh Yetti Nurfitri :

“Dengan adanya WEMC, kita sering mengadakan diskusi, membahas persoalan kesehatan, pendidikan, jamkesmas, ekonomi. Diantara yang banyak itu terpilihilah ekonomi. Untuk menyekolahkan anak kan termasuk ekonomi juga kan? Mau beli lipstik kan juga ekonomi. Jadi semuanya berkaitan dengan ekonomi. Jadi sekarang dengan latar belakang ekonomi yang sulit. akhirnya timbulah satu ide untuk membuat kelompok dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi.” (pertemuan kelompok di Taluk, 21 Desember 2008)

Ernidawati, salah seorang Narasumber WEMC dan juga pengurus Buluh Perindu mengatakan bahwa dia akan merasa rugi ketika dia tidak bisa hadir dalam kegiatan kelompok tersebut, seperti tergambar dalam ucapannya:

“...Apalagi diskusi, kayaknya diskusi itu banyak menambah pengetahuan,apalagi kita diskusi di tempat lain, dengan pergi ke tempat lain kita juga tahu bagaimana keadaan di situ, kalau sekedar kita-kita saja kan kita sudah tahu ya ”.

Hal senada juga disampaikan oleh Yendrawati, pengurus Buluh Perindu dan juga narasumber WEMC:

“Biasanya rasa takut itu besar sekali, apalagi seperti bicara dengan kepala desa, apalagi bicara seperti di musrenbang, paling takut saya, setelah mengikuti inilah, Lega....puas “.

Ernidawati dan Yetti Nurfitri mengatakan bahwa WEMC ini betul-betul memberikan manfaat yang luar biasa bagi mereka. Mereka banyak mendapat pengetahuan dan peningkatan kapasitas diri setelah mengikuti kegiatan WEMC dalam bentuk diskusi dan wawancara yang interaktif dengan narasumber; baik perorangan maupun berkelompok, dengan tema-tema diskusi yang mereka butuhkan seperti: mekanisme Musrenbang desa, kesehatan reproduksi, fiqih perempuan, pendidikan dan beberapa tema lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan mereka.

Meskipun Desa Taluk dan Korong Bungin memiliki persoalan yang sama, yaitu ekonomi namun karena perbedaan kondisi wilayah, maka strategi penanganan masalah antara kedua desa tersebut berbeda. Taluk yang berada di sepanjang pantai dan dekat dengan pusat pemerintah mendirikan koperasi Buluh Perindu sebagai alat perjuangan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sementara di Korong Bungin mereka lebih cenderung memanfaatkan lahan yang ada sebagai alternatif penunjang ekonomi keluarga.

Inisiatif dari peneliti, Juni Warlif, untuk membentuk Balai Perempuan di Korong Bungin. muncul karena melihat ibu-ibu di Korong Bungin yang sedang bergotong royong membersihkan jalan di Korong mereka dengan melihat semangat yang tinggi (Sumber cerita dari Narasumber Nursidah, lihat fieldnote Bulan Maret tanggal 13 Maret). Hingga kemudian berdirilah Balai Perempuan Bungin pada tanggal 6 Januari 2008 yang beranggotakan 35 orang

Bab VII Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian mengenai keberadaan Balai Perempuan sebagai Organisasi Akar Rumput dalam Menghadapi Tantangan Pemberdayaan di Padang Pariaman, khususnya di tiga wilayah penelitian, yaitu, desa Taluk, Bato dan Bungin dibingkai dalam tiga kerangka penelitian. *Pertama*, menggunakan konsep gender yang memiliki premis dasar bahwa kategori “perempuan” dan “laki-laki” bukan sebagai fenomena biologis, tetapi konstruksi-konstruksi kultural sehingga karenanya pada dasarnya tidak tetap dan sekaligus mempunyai konsekuensi-konsekuensi teoritis yang penting. *Kedua*, konsep analisa gender *Women in Development (WID)*, sebuah kerangka analisa yang berupaya membedakan antara kebutuhan bersifat praktis dan strategis bagi perempuan dan laki-laki. Dan *Ketiga*, teori *Women Centered Organization (WCO)*, yang mencoba melihat kembali asumsi-asumsi, konsep dan definisi pengorganisasian tradisional untuk kemudian memasukkan pengalaman-pengalaman perempuan ke dalamnya, terlebih mengingat salah satu bahasan penelitian ini menyoal proses pengorganisasian dan pemberdayaan yang terjadi di dalam Balai Perempuan.

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat secara umum bahwa sebagian besar perempuan yang secara aktif terlibat di Balai Perempuan merasakan dampak positif dari keterlibatan mereka baik secara individu maupun kolektif. Dari hasil penelusuran dan wawancara dapat diketahui bahwa salah satu faktor ketertarikan mereka untuk terlibat aktif di Balai Perempuan karena adanya ajakan dan perubahan positif yang tampak dari para anggota yang telah lebih dulu aktif sehingga mereka terdorong untuk ikut bergabung.

Namun, ketertarikan dan keterlibatan itu belum sepenuhnya mencerminkan keberdayaan perempuan sebagaimana yang diharapkan dan diidealkan dengan adanya Balai Perempuan sebagai salah satu struktur dari organisasi Koalisi Perempuan Indonesia di tingkat komunitas/desa/kelurahan. Proses pembentukan dan pemeliharaan Balai Perempuan tidak berjalan seperti yang telah diformulasikan Koalisi Perempuan Indonesia.

Proses pemberdayaan dalam konteks WEMC dilihat bukan semata bayangan cermin sebaliknya dari proses ketidakberdayaan. Ketika perempuan bisa dilemahkan atau diletakkan sebagai obyek-obyek dari kekuasaan oleh dominasi lain, mereka tidak dapat menjadi berdaya dengan cara yang sama – yakni, semata obyek dari ‘pemberdayaan’.

Sebaliknya, perempuan sendiri perlu menolak pengaturan-pengaturan kekuasaan yang tidak memberdayakan mereka. Tanpa penolakan subyektif dari mereka atas pengaturan-pengaturan tersebut, meskipun ketika relasi dan struktur yang berlangsung saat ini telah berubah atau bahkan dihapuskan oleh kekuatan-kekuatan lain, relasi kekuasaan yang tidak seimbang dapat dengan mudah berulang kembali, termasuk oleh perempuan-perempuan yang menginternalisasikan hal ini sebagai aturan sosial atau budaya yang harus dipatuhi.

Namun demikian, ditemukan juga kasus yang tidak serta merta mengaimini premis dasar di atas. Dengan kata lain ingin ditegaskan bahwa meskipun sudah terjadi penolakan subyektif dari perempuan atas pengaturan-pengaturan yang melemahkan posisi mereka dalam setiap relasi yang dijalinnya, tidak dengan sendirinya bisa melahirkan sikap atau perilaku yang adil terhadap perempuan-perempuan lainnya ketika sebagian di antara mereka menjabat dalam struktur kepemimpinan, meskipun mereka berada dalam satu atap organisasi, dalam hal ini Koalisi Perempuan Indonesia juga mengalaminya.

Dengan demikian perempuan-perempuan yang terlibat dalam proses penelitian ini, dalam dinamika internal organisasi Koalisi Perempuan Indonesia belum bisa sepenuhnya

menjadikan kepentingan perempuan sebagai komitmen bersama dalam meraih keadilan dan demokrasi.

Perjalanan panjang penelitian dan advokasi mengenai Balai Perempuan di wilayah-wilayah penelitian menunjukkan terjalinnya kerja sama di antara Balai Perempuan dengan organisasi akar rumput lainnya dan aparat pemerintah nagari.

Perubahan pola hubungan tersebut seiring dengan kondisi politik negara yang juga banyak berubah. Pemerintah semakin membuka diri. Organisasi-organisasi masyarakat sipil menjalin kerja sama dengan negara secara dinamis, tidak lagi konfliktual, bahkan berupaya memperbaiki kinerja pemerintah daerah dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan prioritas pembangunan.

Keterlibatan masyarakat menjadi penting, demikian pula halnya Musrenbang, wadah pertemuan di antara negara dengan masyarakat sipil. Wadah ini dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal untuk membuka akses bagi masyarakat untuk andil dalam merumuskan kebutuhan, terutama kebutuhan kaum perempuan.

Peningkatan partisipasi perempuan dalam hal akses, kehadiran, dan pengaruh (*access, presence, and influence*), masih sangat terbatas, khususnya di bidang perencanaan pembangunan, pembuatan kebijakan, dan penganggaran. Namun keberadaan Balai Perempuan di wilayah-wilayah penelitian mampu mempengaruhi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan masalah dan kebutuhan perempuan, khususnya alokasi anggaran di bidang kesehatan dan pendidikan.

Temuan lapangan di Korong Bungin menjadi salah satu bukti bahwa keberdayaan perempuan dan keterlibatannya dalam program-program pembangunan sangat membantu terbukanya peluang bagi terakomodasinya kepentingan-kepentingan perempuan yang bersifat praktis. Keberadaan BP di Korong Bungin yang dipimpin Fitri Yanti (Uni Upik), satu-satunya Wali Korong perempuan dari 41 Korong yang ada di Nagari Lareh Nan Panjang, berdampak positif bagi kemajuan perempuan juga masyarakat secara umum. Keberadaannya di ranah pemerintahan membuat ia lebih leluasa mengajak perempuan lain untuk dapat mengakses program-program pembangunan yang bersinergi dengan kepentingan perempuan.

Bahwa kepemimpinannya tidak berjalan semulus yang dibayangkan merupakan sesuatu yang bisa dipahami, mengingat ada pihak yang menentang terutama dari kaum lelaki, namun ternyata Uni Upik berhasil mempraktekan politik yang feminin di mana pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang anti kekerasan. Lebih dari itu, caranya yang santun dalam menghadapi setiap tentangan baik dalam bentuk kritik maupun sikap “perlawanan terbuka” berdampak pada semakin terbukanya kesempatan untuk lebih banyak melibatkan perempuan. Ia memilih menghadapi dan mengakomodasi perbedaan, sebuah budaya politik yang bisa menghindari perpecahan di masyarakat.

Dengan temuan-temuan utama di atas, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa Balai Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia dapat menjadi gerakan perempuan alternatif di tingkat akar rumput yang dapat bertahan menghadapi berbagai dinamika yang melemahkan sekaligus membuktikan soliditas gerakan akar rumput menjadi pondasi bagi gerakan organisasi massa yang sesungguhnya.

Berangkat dari berbagai temuan utama sebagaimana dipaparkan di atas, dan untuk memastikan agar gerakan akar rumput ini terus bergeliat menghadapi berbagai tantangan, maka Koalisi Perempuan Indonesia memandang penting untuk :

1. Membuat lingkaran informasi antara penggagas, pelaksana dan penerima manfaat program WEMC, sehingga proses belajar yang dilakukan perempuan penerima manfaat penelitian ini dapat terus diikuti perkembangannya oleh kita semua sehingga satu sama lain dapat saling menguatkan dan saling memberi inspirasi bagi model gerakan perempuan.

2. Secara kontinu memberikan *capacity building* bagi perempuan komunitas sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan situasi kekinian sebagai upaya menjembatani gap pengetahuan. Sehingga pondasi pengetahuan perempuan menjadi mumpuni untuk bekal melakukan advokasi kebijakan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, dengan melibatkan semua stakeholder. Hal ini penting untuk “penyegaran kembali” agar dapat merumuskan strategi advokasi bagi kemajuan perempuan yang lebih tepat.

Dengan adanya kebutuhan di atas, maka Koalisi Perempuan Indonesia memandang penting program WEMC ini dapat diteruskan, yang berfokus pada bagaimana perempuan dapat secara mandiri melakukan advokasi terhadap kepentingannya baik di level rumah tangga, masyarakat maupun di level pemerintahan.

Lampiran 1 :

Daftar Pustaka

1. AD/ ART Koalisi Perempuan Indonesia cetakan 2005
2. Abdullah, 1967
3. Azra A , 2003
4. Elfira, Makalah : Minangkabau “yang lain” Negosiasi, Marlineal, Islam dan Identitas Minangkabau, 2005
5. Edriana Nurdin, 2000
6. Felmi Yetty, Fieldnote Penelitian 2008-2009
7. Juni Warlif, Fieldnote Penelitian 2008-2009
8. Kerangka Penelitian WEMC, 2007
9. Proposal Penelitian WEMC SCN-SP, 2007
10. Perda No 9 tahun 2000 tentang Otonomi Daerah
11. Quartely Report 2008-2009
12. Zaskia Wierenga, “Matrilineality and Womens Interest : The Minangkabau of Western Sumatera” dalam *Subversive Women : Womens Movement in Africa, Asia, Latin, America, Carribean*, 1995
13. Zaskia Wierenga, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia : Garba Budaya dan Kalyanamitra*, Jakarta 1999